



# SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

(KONTRAK KERJASAMA)



Antara

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN KOTABARU  
(BIDANG PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN DATA)**

Dengan

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Nomor : 073/10/LITB.BAPPEDA

Nomor :293/UN8/KS/2023

Tentang

**Pembangunan Sektor Pariwisata Goa Hasan Basry Dan Goa Liang Udut Di  
Kecamatan Kalumpang Barat Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Rachmat Hidayat, ST.,MS.** : Jabatan Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Data Bappeda Kabupaten Kotabaru selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran No : 954/04/SEKRE.BAPPEDA, tanggal 06 Januari 2023 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Dr.H.Zainuddin, S.H., M.Hum.** : Jabatan Ketua Peneliti Pembangunan Sektor Pariwisata Goa Hasan Basry Dan Goa Liang Udut Di Kecamatan Kalumpang Barat Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotabaru selaku dari Penugasan dari Ketua LPPM Universitas Lambung Mangkurat, alamat di Jl. Brigjend H. Basry, berdasarkan surat Penugasan Nomor : 752 /UN8.2/PG/2023 tanggal 28 April 2023 (Lampiran 1), disebut **PIHAK KEDUA.**

Para pihak berdasarkan :

1. MOU antara Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan LPPM Universitas Lambung Mangkurat No.04 Tahun 2020 dan No. 004/UN8/KS/2020 tanggal 23 Maret 2020.
2. Surat Kepala Bappeda Kotabaru No. 073/10/LITB.BAPPEDA/2023, tanggal 27 April 2023 tentang Penawaran Penyusunan Dukumen Kajian Penelitian.
3. Surat LPPM Universitas Lambung Mangkurat No. 752/UN8.2/PG/2023 Tanggal 28 April 2023

Dengan ini menyatakan sepakat membuat perjanjian kerjasama pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dengan ketentuan sebagai berikut :

## **Pasal I RUANG LINGKUP**

- 1.1. PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tersebut di bawah ini :

Pembangunan Sektor Pariwisata Goa Hasan Basry Dan Goa Liang Udut Di Kecamatan Kalumpang Barat Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

- 1.2 PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas seluruh pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan/Kajian sebagaimana di masud pada ayat (1).
- 1.3 Apabila terdapat perbaikan dan penyempurnaan dari PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakannya sesuai yang tertera pada pasal 2.

## **Pasal 2 JENIS PEKERJAAN**

Kegiatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ( 1) diatas meliputi hal-hal berikut :

- 2.1 Persiapan
- 2.2 Pengumpulan data sekunder
- 2.3 Melaksanakan Presentase Awal
- 2.4 Melakukan survey data lapangan dan Data yang ada pada SKPD terkait
- 2.5. Melakukan Pengolahan Data
- 2.6 Melakukan Penyusunan Laporan Akhir Penelitian dan Pengembangan
- 2.7 Penyampaian Presentase Laporan Akhir

## **Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- 3.1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA;
- d. Membantu keperluan data yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk kelancaran pekerjaan;
- e. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi

### 3.2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menerima pembayaran untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang ditentukan dalam pasal 4 Surat Perjanjian ini;
- b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk keperluan akan data dari PIHAK PERTAMA;
- c. Membuat dan melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA;
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini;
- e. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;
- f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyelesaian pekerjaan
- g. Menyampaikan Laporan antara lain :
  1. Laporan Awal sebanyak 5 rangkap (*hard cover*)
  2. Laporan Antara sebanyak 5 rangkap (*hardcover*)
  3. Laporan Akhir sebanyak 10 rangkap (*hardcover*)
  4. Menyampaikan file Sofcopy

### Pasal 4

#### HARGA KONTRAK PEKERJAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- 4.1. Biaya pekerjaan pada masing-masing Penelitian dan Pengembangan adalah bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2023.
- 4.2. Jumlah harga kontrak Pekerjaan tersebut dalam pasal 1 adalah sebagaimana disetujui oleh kedua belah pihak :

No.	Judul Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dana (Rp.)
1.	Pembangunan Sektor Pariwisata Goa Hasan Basry Dan Goa Liang Udut Di Kecamatan Kalumpang Barat Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Rp. 437.875.000,-

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

- 5.1. PIHAK KEDUA akan menyelesaikan pekerjaan Penelitian dan Pengembangan /Kajian yang akan di cantumkan dalam Perjanjian Kontrak Penugasan dengan Ketua Peneliti.
- 5.2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA perihal Kontrak Perjanjian Kontrak Penugasan dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak Kerjasama ini.
- 5.3 PIHAK KEDUA akan menyelesaikan Pekerjaan Kajian Strategi Peran Pemerintah dalam Memberdayakan Masyarakat untuk Kajian Pembangunan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Kotabaru dalam jangka waktu 75 hari kalender 02 Oktober sampai dengan 15 Desember 2023.

**Pasal 6**  
**CARA PEMBAYARAN**

- 6.1. Biaya Pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 437.875.000,- (Empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah pekerjaan mencapai 100 %.
- 6.2. Pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan ditransfer oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui rekening :  
  
Nama Bank : Mandiri  
Nama Rekening : RPL 045 BLU ULM untuk DK  
No Rekening : 0310081880000
- 6.3 Dalam Pengajuan pembayaran PIHAK KEDUA melampirkan syarat -syarat pembayaran atau bukti pembelian kepada PIHAK PERTAMA dan akan dibayarkan sesuai dengan penggunaan dana.

**Pasal 7**  
**BIAYA MATERAI DAN PAJAK**

- 7.1. Biaya Materai dalam perjanjian Kerjasama Kontrak ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA
- 7.2. Biaya pelaksanaan pekerjaan dokumen dimaksud seperti tercantum pada Pasal 6 ayat 1 di atas termasuk pajak PPh (2%).

**Pasal 8**  
**PERSYARATAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS**

- 8.1 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 1 Surat Perjanjian ini harus mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

- 9.1 Apabila penyerahan pekerjaan yang dimaksud tidak dilakukan pada waktu yang telah ditentukan dalam pasal 3 sehingga mengakibatkan keterlambatan pekerjaan maka PIHAK KEDUA dikenakan denda 1/1000 (satu permil) untuk tiap hari keterlambatan dengan jumlah denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan.
- 9.2 Alasan yang mengakibatkan keterlambatan pekerjaan maupun keterlambatan pembayaran diluar kemampuan kedua belah pihak diselesaikan secara musyawarah.
- 9.3 Kondisi diatas tidak berlaku dalam keadaan *Post Majure*.

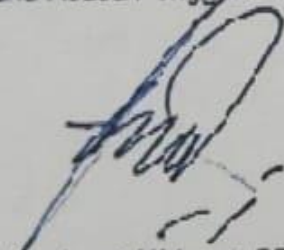
### Pasal 10 PERSELISIHAN

- 10.1 Perselisihan bersifat teknis akan diselesaikan dalam bentuk musyawarah yang dihadiri PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan seorang dari yang dipilih dan disetujui bersama.
- 10.2 Perselisihan lainnya yang bersifat ancaman /hukuman akan diselesaikan melalui Kantor ke Paniteraon Pengadilan Negeri Kotabaru.

### Pasal 11 PENUTUP

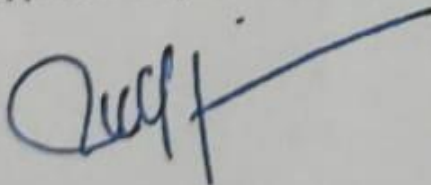
- 11.1 Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari tanggal dan tahun seperti tersebut diatas pada rangkap dua asli yang masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama; 1 ( satu ) dipegang PIHAK PERTAMA dan 1 (satu ) dipegang PIHAK KEDUA.

Kabid. Penelitian, Pencanaan dan Data  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



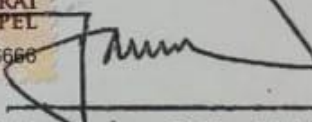
Rachmat Hidayat, ST. MS  
NIP. 19791127 200312 1 008

Kepala Bappeda Kabupaten Kotabaru



Ir. Rurien Srihardjanti, MM  
NIP. 19680428 1993303 2 008

Ketua Peneliti,



Dr. Zainuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 195810051984031001



Prof. Suranda, S.Si., M.Sc., Ph.D  
NIP. 197208202005011006





**BAPPEDA KABUPATEN KOTABARU**

**Kalimantan Selatan**

## PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA GOA HASAN BASRY DAN GOA LIANG UDUT DI KECAMATAN KALUMPANG BARAT UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH



**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**  
**2023**



# **BAPPEDA KABUPATEN KOTABARU**

## **Kalimantan Selatan**

---

---

### **LAPORAN AKHIR**

**PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA  
GOA HASAN BASRY DAN GOA LIANG UDUT  
DI KECAMATAN KALUMPANG BARAT UNTUK  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**

---

---

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
2023**



**HALAMAN PENGESAHAN  
PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI**

**Judul Penelitian** : PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA GOA HASAN BASRY DAN GOA LIANG UDUT DI KECAMATAN KALUMPANG BARAT UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

**Ketua Peneliti**  
a. Nama Lengkap : Dr.H.Zainuddin, S.H., M.Hum. (L)  
b. NIDN : 8986670023  
c. Jabatan Fungsional : Lektor  
d. Program Studi : Ilmu Hukum  
e. Nomor HP : 082252779076  
f. Alamat surel (e-mail) : zainuddinmappong123@gmail.com

**Anggota Peneliti (1)**  
a. Nama Lengkap : Prof.Dr.Suprpto, S.H.,M.H.  
b. NIDN/NIDK : 0017058102  
c. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

**Anggota Peneliti (2)**  
a. Nama Lengkap : Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.  
b. NIDN/NIDK : 0003098303  
c. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

**Mahasiswa yang terlibat (1)**  
a. Nama Lengkap/NIM : Muhammad Rizki Anugerah/ 2320215310110  
b. Nama Lengkap/NIM : Jayadi Ilham Hasani/ 2320215310173

**Tenaga Penunjang**  
a. Surveyor : Hanani Fadillah, S.Kom

**Lama Penelitian** : 1 tahun

**Biaya Penelitian Keseluruhan** : Rp 437.875.000,-  
Sumber Biaya : Pemerintah Kabupaten Kotabaru  
Biaya Penelitian :  
- diusulkan : Rp -  
- dana institusi lain : Rp -/in kind tuliskan -  
Biaya Luaran Tambahan : -

Banjarmasin, 01 Oktober 2023

Ketua Peneliti,

(Dr.H.Zainuddin, S.H., M.Hum.)  
NIP. 195810051984031001

Mengetahui,  
Dekan/Ketua

(Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.)  
NIP. 197506152003121001

Menyetujui  
Ketua LPPM

Prof. Sunardi, S.Si., M.Sc., Ph.D  
NIP. 197708202005011006

# **KATA PENGANTAR**

Dengan hormat,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan judul **"Pembangunan Sektor Pariwisata Goa Hasan Basry dan Goa Liang Udut di Kecamatan Kalumpang Barat untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah."** Laporan ini merupakan hasil upaya kami dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembangunan pariwisata yang diharapkan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta ekonomi daerah.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kerjasama selama proses pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memberikan izin dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kami juga berterima kasih kepada masyarakat setempat yang telah turut serta dalam proses pengembangan pariwisata di wilayah ini.

Selain itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik dalam bentuk saran, masukan, maupun partisipasi aktif dalam proses pelaksanaan kegiatan ini. Semua kerjasama dan dukungan yang diberikan telah membantu kami dalam mencapai tujuan pembangunan pariwisata ini.

Laporan Akhir ini berisi gambaran umum tentang kegiatan pembangunan pariwisata di Goa Hasan Basry dan Goa Liang Udut, termasuk tujuan kegiatan, proses pelaksanaan, hasil yang telah dicapai, serta rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut. Kami berharap bahwa laporan ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam pengembangan sektor pariwisata di daerah ini.

Kami menyadari bahwa pembangunan pariwisata merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, mengurangi tingkat pengangguran, serta mempromosikan potensi wisata yang dimiliki. Oleh karena itu, kami berharap kegiatan ini dapat menjadi salah satu langkah positif dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah ini.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi panduan yang baik dalam pengembangan sektor pariwisata di Kecamatan Kalumpang Barat. Kami juga berharap agar kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat dan ekonomi daerah. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak. Terima kasih.

Hormat Kami  
Banjarmasin, September 2023

**Tim Penyusun**

# DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	2
B. Permasalahan Yang Diteliti .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Kewenangan Pemerintah Daerah .....	11
B. Kajian Teori Dalam Pengembangan Pariwisata .....	22
C. Pengembangan Pariwisata .....	26
D. Gambaran Umum Kabupaten Kotabaru .....	36
<b>BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Tujuan Penelitian .....	42
B. Manfaat Penelitian .....	44
<b>BAB IV METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Jenis Penelitian .....	48
B. Sifat Penelitian .....	48
C. Bahan atau Materi Penelitian .....	49
D. Jalannya Penelitian .....	50
E. Analisis Data .....	51
<b>BAB V HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI .....</b>	<b>52</b>
A. Peningkatan Infrastruktur Pendukung dan Strategi Promosi Pariwisata .....	53
B. Partisipasi Masyarakat Setempat Dalam Pengembangan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan .....	74
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
Daftar Pustaka	
Lampiran	



# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan Kepariwisata di daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada ciri khas daerah yang terkait dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal. Bahkan dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak hanya mengandalkan dana perimbangan pusat dan daerah, tetapi juga menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan berkelanjutan.

Salah satu sumber potensial Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata daerah Kabupaten Kotabaru didukung Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menyebutkan keberadaan obyek wisata pada suatu daerah akan sangat menguntungkan, antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

melestarikan alam dan lingkungan, memperkuat jati diri bangsa dan memupuk rasa cinta tanah air.

Saat ini Kabupaten Kotabaru telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kotabaru Tahun 2018-2025 dimana dalam perda ini dijelaskan bahwa Kabupaten Kotabaru sebagai salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Selatan dan salah satu destinasi wisata di Indonesia memiliki luas wilayah 9.422,46 km<sup>2</sup> sekaligus sebagai kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas lebih dari seperempat (25,11%) dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Beragaman potensi sumberdaya di kabupaten ini, terutama keberagaman sumberdaya wisata. Potensi wisata yang dimiliki sangat memungkinkan pengembangannya dalam rangka menggerakkan ekonomi kerakyatan, kemandirian, mampu mengemban peningkatan kualitas kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat serta menjadi daerah tujuan destinasi wisata Kalimantan Selatan, nasional hingga skala internasional.

Perda ini juga mengamanatkan, kekayaan alam dan budaya Kabupaten Kotabaru yang tersebar diseluruh Pulau-pulau Kecamatan telah mendorong Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk membangun dan menggali potensi budaya yang ada dan mengembangkan sektor pariwisata. Sektor ini penting untuk dikembangkan karena dapat memberikan manfaat langsung pada masyarakat dan menjaga kelestarian alam dan budaya yang

telah diwariskan pendahulu kita dan selanjutnya akan terus di warisan ke generasi selanjutnya.

Kabupaten Kotabaru dengan wilayah yang terdiri dari pulau-pulau diharapkan mampu menjadi daerah tujuan wisata Kalimantan Selatan khususnya dan daerah tujuan wisata nasional bahkan internasional, karena daerah ini memiliki potensi budaya (budaya pesisir, budaya pedalaman) dengan multi suku, seperti suku Banjar, Suku Dayak, Suku Bugis, Suku Bajau, Suku Mandar dan suku-suku lainnya. Tidak kalah menarik adalah sejarah budaya kabupaten ini bisa menjadi destinasi wisata yang khas yang mampu bersaing dengan tujuan wisata lainnya di tanah air. Potensi alam dengan flora yang dimiliki mampu dijadikan sebagai wisata alam. Dari hamparan pantai luas dan gugusan pulau-pulau dapat dikembangkan sebagai wisata kelautan "Bahari". Begitu juga gugusan pegunungan batu kapur yang dapat dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata gunung dengan goa-goa. Hutan yang masih luas dan memiliki nilai estetika dapat dikembangkan menjadi wisata hutan.

Salah satu di antara keindahan alam yang dimiliki oleh Kotabaru, di antaranya adalah objek wisata Goa Hasan Basry dan Goa Liang Udut yang terletak di Kecamatan Kalumpang Barat. Goa Hasan Basry dan Goa Liang Udut merupakan dua objek wisata alam yang sangat menarik dan mempesona.



Goa Hasan Basry & Goa Liang Udut

Meskipun objek wisata ini memiliki potensi yang sangat besar, namun pengembangan pariwisata di Kabupaten Kotabaru masih terbilang kurang optimal. Padahal, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Selain meningkatkan pendapatan asli daerah, pengembangan sektor pariwisata juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kotabaru, khususnya di Kecamatan Kalumpang Barat.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata di Kabupaten Kotabaru antara lain kurangnya infrastruktur, kurangnya promosi pariwisata, dan masalah lingkungan. Faktor-faktor tersebut perlu diperhatikan dan diatasi agar pengembangan pariwisata di Kabupaten Kotabaru dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan.



Sebelumnya telah terbukti bahwa meningkatkan sektor pariwisata di daerah pedesaan dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang positif. Sebagai contoh, di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pengembangan pariwisata telah mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan lapangan kerja, penghasilan masyarakat, dan investasi di sektor pariwisata. Selain itu, pariwisata di daerah pedesaan juga membantu mempromosikan warisan budaya dan alam setempat, membangun kesadaran lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan potensi besar dari pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di daerah pedesaan untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan serta mampu meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi objek wisata Goa Hasan Basry dan Goa Liang Udut di Kecamatan Kalumpang Barat sebagai sumber penghasilan baru bagi Kabupaten Kotabaru. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis mengenai potensi objek wisata, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata, serta strategi pengembangan pariwisata yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Salah satu aspek penting dalam pengembangan pariwisata adalah pemasaran dan promosi pariwisata. Tanpa promosi yang efektif, potensi wisata yang dimiliki oleh suatu daerah tidak akan tergali secara maksimal. Selain itu, aspek infrastruktur juga menjadi hal penting dalam pengembangan pariwisata. Infrastruktur yang memadai dapat

meningkatkan kenyamanan dan keamanan wisatawan saat berkunjung ke suatu daerah. Oleh karena itu, kegiatan ini juga akan membahas tentang kondisi infrastruktur di Kabupaten Kotabaru dan strategi pengembangan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan sektor pariwisata.

Selain infrastruktur, kelestarian lingkungan juga menjadi faktor penting dalam pengembangan pariwisata. Objek wisata alam seperti Goa Hasan Basry dan Goa Liang Udut memiliki potensi alam yang sangat kaya dan menarik. Namun, apabila tidak dikelola dengan baik, potensi alam tersebut dapat rusak dan menurun. Sehingga diharapkan melalui kegiatan ini dapat diberikan deskripsi dan kajian yang komprehensif mengenai Pembangunan Sektor Pariwisata Goa Hasan Basry dan Goa Liang Udut.

## **B. Permasalahan Yang Diteliti**

Lebih lanjut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan:

1. **Infrastruktur Pendukung yang Terbatas:** Salah satu permasalahan yang dapat diteliti adalah kurangnya infrastruktur pendukung pariwisata di kedua goa tersebut. Ini termasuk akses jalan yang sulit, fasilitas sanitasi yang minim, dan kekurangan fasilitas pendukung lainnya yang dapat mempengaruhi pengalaman wisatawan.
2. **Minimnya Promosi Pariwisata:** Promosi pariwisata yang kurang memadai juga dapat menjadi permasalahan. Pemasaran dan promosi yang efektif sangat penting untuk menarik wisatawan dan

meningkatkan kunjungan ke kedua goa tersebut. Oleh karena itu, penting untuk meneliti strategi promosi yang tepat untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik pariwisata.

3. Keterlibatan Masyarakat Setempat: Permasalahan lain yang perlu diteliti adalah tingkat keterlibatan masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata. Melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan memberdayakan mereka dalam mengelola pariwisata dapat meningkatkan keberlanjutan dan manfaat ekonomi yang diperoleh dari sektor pariwisata.
4. Dampak Lingkungan: Pembangunan sektor pariwisata juga harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Pengunjung yang banyak dapat memberikan tekanan pada ekosistem alami, warisan budaya, dan sumber daya alam di sekitar goa. Oleh karena itu, perlu diteliti bagaimana pengembangan pariwisata dapat dilakukan secara berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan.
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Pembangunan sektor pariwisata yang berhasil juga memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi tenaga kerja lokal dapat membantu meningkatkan kualitas layanan pariwisata dan memastikan pengalaman wisatawan yang memuaskan.

Berdasarkan inventarisasi masalah tersebut diatas dapat disederhanakan menjadi 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana meningkatkan infrastruktur pendukung dan strategi promosi pariwisata di kedua goa tersebut untuk menarik lebih banyak wisatawan dan meningkatkan pengalaman mereka?
2. Bagaimana keterlibatan masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata sambil menjaga keberlanjutan lingkungan di sekitar goa?

The background of the slide is a collage of hexagonal images. The top-left hexagon shows a dark, rocky cave interior. The top-right hexagon shows a bright cave entrance with sunlight and green foliage outside. The middle hexagon shows a sandy cave floor. The bottom-left hexagon shows a waterfall cascading over dark rocks. The bottom-right hexagon shows a person standing on a rocky path in a lush, green forest.

# **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA**

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kewenangan Pemerintah Daerah**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan. daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan

tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana di rubah oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang segala sesuatu yang fundamental yang berkaitan dengan pemerintahan daerah yaitu:

1. Pemerintahan daerah adalah Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.;
5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah;
7. Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.



9. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi;
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
11. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Wilayah Administratif adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah.
13. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;

14. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
15. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara;
16. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
17. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapat persetujuan bersama Dewan perwakilan Rakyat (DPRD). Substansi atau muatan materi Perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan yang lebih tinggi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 37.

Kewenangan menurut F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata Negara dan hukum administrasi, "*Het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staat-en administratief recht*".<sup>2</sup> Karena itulah Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi.

Menurut H.D. Stout, "*Bevoegdheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het besturrechtelijke rechtsverkeer*" (wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik).<sup>3</sup>

Selanjutnya menurut F.P.C.L. Tonnaer, "*Overheidsbevoegdheid word in dit verband opgevat als het vermogwn om positief recht vast te stellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers anderling en tussen overhead en te scheppen*" (Kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan

---

<sup>2</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 101.

<sup>3</sup> HR, *Hukum Administrasi Negara*.

dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antar pemerintah dengan warga Negara).<sup>4</sup>

Bagir Manan berpendapat bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbestuuren*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan Negara secara keseluruhan.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 ayat (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum, yang kemudian dalam ayat (3) dijelaskan kembali bahwa Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Dan pada ayat (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

---

<sup>4</sup> HR.

<sup>5</sup> Bagir Manan, "Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah" (Makalah Pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, Mei 2000), 1-2.

Sedangkan urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 10 ayat (1) adalah:

1. Politik luar negeri;
2. Pertahanan;
3. Keamanan;
4. Yustisi;
5. Moneter dan Fiskal Nasional; dan
6. Agama.

Sementara urusan pemerintah daerah berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Dimana urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dimana kewenangan terkait dengan pariwisata ada pada pasal 12 ayat (2) dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan hal ini maka Kaho menyatakan bahwa, "Prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab adalah otonomi daerah itu harus merupakan otonomi yang bertanggung jawab, dalam arti bahwa pemberian otonomi itu harus benar-benar sejalan dengan tujuannya, yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar di pelosok negara dan serasi atau tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan, pembinaan politik dan kesatuan bangsa serta menjadi hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas dasar keutuhan negara

kesatuan". Otonomi daerah memberikan peluang yang besar kepada daerah. Peluang besar tersebut dikarenakan adanya penyerahan urusan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Dengan adanya otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan untuk : Pertama, Hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri; Kedua, Wewenang untuk mengatur daerah sendiri; Ketiga, Kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri.

Jadi otonomi merupakan pemberian kebebasan untuk mengurus rumah tangga sendiri, tanpa mengabaikan kedudukan pemerintah Daerah sebagai aparat Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan tugas-tugas yang ditugaskan kepadanya. Dengan demikian kebutuhan otonomi dalam pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperbesar kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dan memperkecil intervensi pemerintah Pusat dalam urusan rumah tangga daerah.

Berdasarkan hal ini Otonomi Daerah dapat dipandang sebagai cara untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien dan berwibawa yang mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya pemberian kewenangan oleh undang-undang kepada Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tersebut, maka semakin menunjukkan penerapan asas

legalitas di Indonesia, bahwa maknanya adalah *Dat het bestuur aan de wet is onderworpen* (bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang) atau *Het legaliteitsbeginsel houdt in dat alle (algemene) de burgers bindende bepalingen op de wet moeten berusten* (bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang),<sup>6</sup> dalam hal ini termasuk juga setiap pemberian kewenangan yang diberikan oleh undang-undang otonomi daerah kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Penerapan asas legalitas ini dalam bidang pemerintahan khususnya di era otonomi daerah diharapkan akan dapat menciptakan kepastian hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian substansi dari penerapan asas legalitas adalah wewenang yakni *Het vermogen tot het verrichten van be paalde rechtshandelingen* (kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu).<sup>7</sup>

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Sementara dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur

---

<sup>6</sup> HR, *Hukum Administrasi Negara*, 95.

<sup>7</sup> HR, 101.

sendiri (*zalfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikana pemerintahan negara secara keseluruhan.<sup>8</sup> Dalam hal ini Pemberian otonomi daerah kepada daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak dapat dilepaskan keberadaannya dari NKRI, sehingga memberikan implikasi hukum bahwa setiap kebijakan yang ada di daerah harus tetap seiring dan sejalan dengan kepentingan nasional.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18, pemerintah daerah diberikan pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Bahwa Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan,

---

<sup>8</sup> HR, 102.



peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.<sup>9</sup>

Dengan begitu maka, Peraturan Daerah sebagai salah satu instrumen hukum (Produk Hukum Daerah) yang dilahirkan untuk memberikan aturan terhadap kebijakan atau pun aspirasi yang muncul di daerah, yang kemudian diterapkan dalam daerah masing-masing (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

## **B. Kajian Teori Dalam Pengembangan Pariwisata**

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Bab I Pasal 1 dinyatakan bahwa Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat berperan dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayah yaitu dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan suatu daerah maupun bagi masyarakat. Dengan kontribusi yang diberikan ini, pemerintah daerah memiliki tambahan pemasukan dalam rangka pembangunan proyek-proyek maupun kegiatan lain di wilayahnya. Pariwisata seringkali dipersepsikan

---

<sup>9</sup> HR, *Hukum Administrasi Negara*.

sebagai mesin ekonomi penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi di suatu negara tidak terkecuali di Indonesia. Namun demikian pada prinsipnya pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas bagi suatu negara.

Sebagai salah satu sektor pembangunan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah<sup>10</sup>, pariwisata dianggap sebagai suatu aset yang strategis untuk mendorong pembangunan pada wilayah-wilayah tertentu yang mempunyai potensi objek wisata. Dengan adanya perkembangan industri pariwisata di suatu wilayah, arus urbanisasi ke kota-kota besar dapat lebih ditekan. Hal ini disebabkan pariwisata memiliki tiga aspek pengaruh yaitu aspek ekonomis (sumber devisa, pajak-pajak), aspek sosial (penciptaan lapangan kerja) dan aspek budaya<sup>11</sup>. Keberadaan sektor pariwisata tersebut seharusnya memperoleh dukungan dari semua pihak seperti pemerintah daerah sebagai pengelola dan regulator, masyarakat yang berada di lokasi objek wisata serta partisipasi pihak swasta sebagai pengembang.

Selain peran yang dimilikinya, pariwisata juga merupakan suatu sektor yang tidak jauh berbeda dengan sektor ekonomi yang lain yaitu dalam proses perkembangannya juga mempunyai dampak atau pengaruh di bidang sosial dan ekonomi. Pengaruh yang ditimbulkan tersebut dapat berupa pengaruh positif maupun negatif terhadap kehidupan masyarakat

---

<sup>10</sup> Selo Soemardjan, *Pariwisata dan Kebudayaan* (Jakarta: Prisma, 1977), 58.

<sup>11</sup> Soemardjan, 85.

setempat. Untuk mencegah perubahan itu menuju ke arah negatif maka diperlukan suatu perencanaan yang mencakup perencanaan pada aspek sosial dan ekonomi, sehingga sedapat mungkin masyarakat setempat ikut terlibat di dalam perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Hal ini perlu dilakukan untuk mendukung keberhasilan pengembangan daerah wisata yang bersangkutan<sup>12</sup>, dengan demikian proses pembangunan dan pengembangan suatu wilayah dapat ditunjang oleh potensi wisata yang dimilikinya.

Pariwisata perlu dikembangkan dengan alasan bahwa pembangunan pariwisata pada suatu daerah tertentu tergantung pada pengambil kebijakan melalui penelitian atau pengkajian terhadap semua aspek yang berkaitan dengan pariwisata tersebut. Mulai dari potensi yang dimiliki daerah tersebut, kebiasaan hidup masyarakat di sekitarnya, kepercayaan yang dianut, sampai dengan tingkah laku atau kebiasaan wisatawan yang direncanakan akan ditarik untuk berkunjung ke daerah tersebut.<sup>13</sup>

Dalam UU No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Orang yang melakukan kegiatan wisata disebut wisatawan.

---

<sup>12</sup> H Kodyat, *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1982), 4.

<sup>13</sup> Oka A. Yoety, *Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 12.

Oka A. Yoeti menyatakan bahwa istilah wisatawan harus diartikan sebagai seorang, tanpa membedakan ras, kelamin, bahasa dan agama, yang memasuki wilayah suatu negara yang mengadakan perjanjian yang lain daripada negara dimana orang itu biasanya tinggal dan berada disitu kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 6 bulan, di dalam jangka waktu 12 bulan berturut-turut, untuk tujuan non migran yang legal, seperti perjalanan wisata, rekreasi, olahraga, kesehatan, alasan keluarga, studi, ibadah keagamaan atau urusan usaha (*business*).<sup>14</sup> Pariwisata, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut (UU No. 9 Tahun 1990). Sedangkan pengertian pariwisata menurut dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu secara:<sup>15</sup>

#### 1. Umum

Pariwisata, adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus, dan melayani kebutuhan wisatawan.

#### 2. Teknis

Pariwisata merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri atau di negara lain. Kegiatan tersebut dengan menggunakan kemudahan, jasa, dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh pemerintah dan atau

---

<sup>14</sup> Yoety, 15.

<sup>15</sup> A. Hari Karyono, *Kepariwisata* (Jakarta: Grasindo, 1997), 15.

masyarakat, agar dapat mewujudkan keinginan wisatawan. Kemudahan dalam batasan pariwisata maksudnya antara lain berupa fasilitas yang memperlancar arus kunjungan wisatawan. Misalnya dengan memberikan bebas visa, prosedur pelayanan yang cepat di pintu-pintu masuk dan keluar, tersedianya transportasi dan akomodasi yang cukup. Faktor penunjangnya adalah prasarana dan utilitas umum, seperti jalan raya, penyediaan air minum, listrik, tempat penukaran uang, pos dan telekomunikasi, dan faktor penunjang lainnya.

### **C. Pengembangan Pariwisata**

Kepariwisataan, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Artinya semua kegiatan dan urusan yang ada kaitannya dengan perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan pariwisata baik yang dilakukan pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Pengembangan Pariwisata dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan, dan kepercayaan pada diri sendiri. Pengembangan Pariwisata bertujuan, untuk:<sup>16</sup>

1. Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata;
2. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;

---

<sup>16</sup> Karyono, 19.

3. Memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
4. Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
5. Mendorong pendayagunaan produksi nasional.

Sisi penyediaan pariwisata terdiri dari empat komponen yaitu:<sup>17</sup>

1. Informasi dan Promosi, motivasi untuk melakukan kunjungan wisata dapat dimiliki seseorang tetapi mungkin saja ia tidak tahu cara melakukannya. Sehingga pengetahuan terhadap daerah tujuan wisata sangat ditentukan oleh ketersediaan informasi.
2. Fasilitas, ketersediaan fasilitas pelayanan berkaitan dengan daya tarik suatu daerah tujuan wisata, seperti fasilitas transportasi yang akan membawanya dari dan ke daerah tujuan wisata yang ingin dikunjunginya, fasilitas akomodasi yang merupakan tempat tinggal sementara di tempat atau di daerah tujuan yang akan dikunjunginya, fasilitas *catering service* yang dapat memberikan pelayanan mengenai makanan dan minuman sesuai dengan selera masing-masing, fasilitas perbelanjaan dimana wisatawan dapat membeli barang-barang souvenir khas dari daerah wisata tersebut, dan termasuk juga infrastruktur yang baik.
3. Daya Tarik, suatu Objek wisata akan berkembang apabila mempunyai daya tarik. Faktor daya tarik inilah yang akan mendorong wisatawan

---

<sup>17</sup> Karyono, 19.

untuk mengunjunginya. Daya tarik suatu daerah tujuan wisata dapat dikelompokkan dalam tiga jenis yaitu sifat khas alam, wisata buatan, dan wisata budaya. Daya tarik wisata ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya jenis atraksi wisata. Atraksi wisata adalah suatu tempat atau area yang memiliki suatu karakteristik/ daya tarik tertentu dan fasilitas wisata yang dapat menarik para pengunjung atau wisatawan untuk dapat berwisata atau berekreasi menikmatinya.<sup>18</sup>

4. Aksesibilitas, jarak antara tempat tinggal dengan daerah tujuan wisata, merupakan faktor yang sangat penting. Pengembangan Pariwisata sangat bergantung pada kemudahan pencapaian daerah tujuan wisata.

Objek wisata, adalah perwujudan ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya, sejarah bangsa, keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan<sup>19</sup>. Sedangkan objek dan daya tarik wisata berdasarkan UU No. 9 Tahun 1990, adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. Secara teoritis penentu kunjungan wisata adalah faktor lokasi dan faktor objek wisata.

Adapun mengenai pengaruh faktor lokasi terhadap perkembangan pariwisata. Wilayah dapat diungkapkan melalui penilaian rute perjalanan wisata. Jenis pariwisata yang didasarkan pada Objek wisata dapat dibedakan menjadi:<sup>20</sup>

#### 1. *Cultural Tourism*

---

<sup>18</sup> Karyono, 26.

<sup>19</sup> Karyono, 27.

<sup>20</sup> Yoety, *Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata*, 114.

Yaitu jenis pariwisata, dimana motivasi orang-orang untuk melakukan perjalanan disebabkan karena adanya daya tarik dari seni budaya suatu tempat atau daerah. Dalam hal ini, Objek yang daya tariknya bersumber pada kebudayaan, seperti peninggalan sejarah, museum, atraksi kesenian, dan Objek lain yang berkaitan dengan budaya. Jadi, Objek kunjungannya adalah warisan nenek moyang, benda-benda kuno.

#### 2. *Recuperriational Tourism*

Biasanya disebut sebagai pariwisata kesehatan. Tujuan daripada orang-orang untuk melakukan perjalanan, adalah untuk menyembuhkan suatu penyakit dengan kegiatan seperti mandi di sumber air panas, mandi di lumpur atau mandi susu di Eropa, mandi kopi di Jepang yang katanya membuat orang menjadi awet muda.

#### 3. *Commercial Tourism*

Disebut sebagai pariwisata perdagangan, karena perjalanan wisata dikaitkan dengan kegiatan perdagangan baik nasional maupun internasional, dimana sering diadakan kegiatan pameran, seminar, dan lain-lain.

#### 4. *Sport Tourism*

Biasanya disebut dengan istilah pariwisata olahraga. Yang dimaksud dengan jenis pariwisata ini ialah perjalanan orang-orang yang bertujuan untuk melihat atau menyaksikan suatu pesta olahraga di suatu tempat atau negara tertentu. Seperti *Olympiade*, *All England*, pertandingan tinju atau sepakbola.



### 5. *Political Tourism*

Biasanya disebut sebagai pariwisata politik, yaitu suatu perjalanan yang tujuannya untuk melihat atau menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan suatu negara, apakah ulang tahun atau peringatan tertentu. Seperti, Hari Angkatan Perang Indonesia, Parade 1 Mei di Tiongkok atau 1 Oktober di Rusia.

### 6. *Social Tourism*

Pariwisata sosial jangan hendaknya diasosiasikan sebagai suatu peristiwa yang berdiri sendiri. Pengertian ini hanya dilihat dari segi penyelenggaraannya saja yang tidak menekankan untuk mencari keuntungan, seperti misalnya *Study Tour*, *Picnic* atau *Youth Tourism* yang sekarang kita kenal dengan Pariwisata Remaja.

### 7. *Religion Tourism*

Yaitu jenis pariwisata dimana tujuan perjalanan yang dilakukan adalah untuk melihat atau menyaksikan upacara-upacara keagamaan. Seperti, misalnya ikut naik Haji Umroh bagi orang yang beragama Islam, kunjungan ke Lourdes bagi orang beragama Katolik, ke Muntilan yang merupakan pusat pengembangan agama Kristen di Jawa Tengah, atau agama Hindu-Bali di Sakenan Bali.

Pengembangan Pariwisata, adalah suatu usaha di dalam pendayagunaan potensi sumber daya alam yang menjadikan daya tariknya sebagai objek wisata yang diharapkan dapat mendorong pengembangan objek-objek wisata lain sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah,

serta dapat memperluas lapangan usaha bagi masyarakat sekitar. Sedangkan menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pengembangan Pariwisata merupakan kegiatan yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah lebih luas.

Pembangunan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan cara mengusahakan, mengelola, dan membuat objek-objek baru sebagai objek dan daya tarik wisata. Produk wisata, adalah seluruh unsur kepariwisataan baik berupa jasa atraksi wisata maupun hasil kreasi yang dapat dinikmati wisatawan serta menjadi kenangan. Usaha pariwisata, adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Usaha pariwisata digolongkan ke dalam:

1. Usaha jasa pariwisata;

Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata. Usaha jasa pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha:

- a) Jasa biro perjalanan wisata
- b) Jasa agen perjalanan wisata
- c) Jasa pramuwisata
- d) Jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran
- e) Jasa impresariat
- f) Jasa konsultan pariwisata

g) Jasa informasi pariwisata

2. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata;

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata, meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dikelompokkan ke dalam:

a) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam, meliputi:

- Pengelolaan dan pemanfaatan taman nasional
- Pembangunan dan pengelolaan taman wisata
- Pembangunan dan pengelolaan taman hutan raya
- Pengelolaan taman laut

b) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya, meliputi:

- Pengelolaan peninggalan sejarah
- Pengelolaan dan/ atau pembangunan museum
- Pembangunan dan/ atau pengelolaan pusat-pusat kesenian dan budaya
- Pembangunan dan pengelolaan taman rekreasi
- Pembangunan dan pengelolaan tempat hiburan
- Pembangunan dan pengelolaan taman satwa
- Pengelolaan monumen

c) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus

- Pengelolaan lokasi-lokasi wisata buru

- Pengelolaan wisata agro
- Pembangunan dan pengelolaan wisata tirta
- Pengelolaan lokasi-lokasi wisata petualangan alam
- Pembangunan dan pengelolaan wisata gua
- Pembangunan dan pengelolaan wisata kesehatan
- Pemanfaatan pusat-pusat dan tempat-tempat budaya, industri
- dan kerajinan

### 3. Usaha sarana pariwisata;

Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata. Usaha sarana pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha:

- a) Penyediaan akomodasi
- b) Penyediaan makan dan minum
- c) Penyediaan angkutan wisata
- d) Penyediaan sarana wisata tirta
- e) Kawasan pariwisata

Kawasan pariwisata, adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

#### 1. Sarana pokok kepariwisataan

Sarana pokok kepariwisataan, adalah sarana yang hidup dan kehidupannya sangat tergantung kepada arus kedatangan orang yang melakukan perjalanan wisata, termasuk kelompok ini, adalah:

- travel agent dan tour operator
- perusahaan-perusahaan angkutan wisata
- hotel dan jenis akomodasi lainnya
- kafe dan restoran

## 2. Sarana pelengkap kepariwisataan

Sarana ini adalah sarana untuk wisata yang fungsinya tidak hanya melengkapi sarana pokok kepariwisataan, tetapi yang terpenting untuk membuat wisatawan lebih lama tinggal. Yang termasuk pada kelompok ini, adalah:

- a) Sarana olahraga
- b) Sarana ketangkasan
- c) Sarana penunjang kepariwisataan

Sarana yang disediakan agar wisatawan lebih banyak mengeluarkan atau membelanjakan uangnya di tempat yang dikunjunginya, di antaranya tempat perbelanjaan, mall dan sebagainya.

Mandala wisata, adalah tempat yang disediakan untuk kegiatan penerangan wisata serta peragaan kesenian dan budaya khas daerah. Sapta pesona merupakan kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung ke suatu daerah atau wilayah di

negara kita. Sapta pesona terdiri dari 7 (tujuh) unsur yaitu aman, tertib, sejuk, indah, ramah, tamah dan kenangan.

Konsep pengembangan kegiatan pariwisata harus diintegrasikan ke dalam pola dan program pembangunan semesta ekonomi, fisik dan sosial suatu negara, karena Pengembangan Pariwisata saling berkait dengan sektor lain. Pengembangan Pariwisata diarahkan sedemikian rupa, sehingga dapat membawa kesejahteraan ekonomi yang tersebar luas dalam masyarakat. Pengembangan Pariwisata harus sadar lingkungan, sehingga pengembangannya mencerminkan ciri-ciri khas budaya dan lingkungan alam suatu negara, bukan merusak lingkungan alam dan budaya yang khas. Konsep Pengembangan Pariwisata akan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

- a. Posisi daya tarik (*Positioning*)
- b. Sinergi daya tarik wisata
- c. Keselarasan antar sektor
- d. Keselarasan lingkungan

Pertimbangan utama yang harus mendayagunakan pariwisata sebagai sarana untuk memelihara kekayaan budaya, lingkungan alam dan peninggalan sejarah, sehingga masyarakat sendiri menikmatinya dan merasa bangga akan kekayaannya itu. Pengembangan Pariwisata harus diarahkan sedemikian rupa, sehingga pertentangan sosial dapat dicegah seminimal mungkin, sedapat mungkin harus menampilkan perubahan-



Kotabaru adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas wilayah 9.480,17 km<sup>2</sup> atau sekitar seperempat luas Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Kotabaru dengan ibukotanya Kotabaru terletak di Pulau Laut yang mana pulau ini adalah pulau terbesar diantara lebih dari 100 pulau besar dan kecil di Pulau Laut. Disamping pulau-pulau tersebut wilayah Kabupaten Kotabaru yang terluas berada di bagian Timur Pulau Kalimantan sampai ke perbatasan Provinsi Kalimantan Timur.<sup>21</sup>

Secara astronomis, Kabupaten Kotabaru terletak antara 2°20' sampai dengan 4°21' Lintang Selatan dan 115°15' sampai dengan 116°30' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kotabaru memiliki batas-batas: Utara – Provinsi Kalimantan Timur; Selatan – Laut Jawa; Timur – Selat Makasar; Barat – Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Banjar, dan Tanah Bumbu. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Kotabaru berada di ujung tenggara Provinsi Kalimantan Selatan, berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur.<sup>22</sup>

Wilayah administrasi Kabupaten Kotabaru terdiri dari 22 kecamatan, yaitu Pulau Laut Barat, Pulau Laut Tanjung Selayar, Pulau Laut Selatan, Pulau Laut Kepulauan, Pulau Laut Timur, Pulau Sebuku, Pulau Laut Utara, Pulau Laut Tengah, Pulau Laut Sigam, Kelumpang Selatan, Kelumpang Hilir, Kelumpang Hulu, Hampang, Sungai Durian, Kelumpang

---

<sup>21</sup> *Kabupaten Kotabaru Dalam Angka 2023* (2023: BPS Kabupaten Kotabaru, Kotabaru), 5.

<sup>22</sup> *Kabupaten Kotabaru Dalam Angka 2023*, 3.



Tengah, Kelumpang Barat, Kelumpang Utara, Pamukan Selatan, Sampanahan, Pamukan Utara, dan Pamukan Barat.<sup>23</sup>

Kecamatan terluas di Kabupaten Kotabaru adalah Kecamatan Hampang dengan luas 1.590,22 km<sup>2</sup> atau 16,97 persen dari luas Kabupaten Kotabaru. Sedangkan kecamatan dengan jarak terjauh menuju ibukota kabupaten adalah Kecamatan Pamukan Utara dengan jarak sejauh 275 km.

Kecamatan Subdistrict	Ibukota Kecamatan Capital of Subdistrict	Luas Total Area (km <sup>2</sup> /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Pulau Sembilan	Tengah	43,44
Pulau Laut Barat	Lontar	245,51
Pulau Laut Tanjung Selayar	Tanjung Selayar	58,16
Pulau Laut Selatan	Tanjung Seloka	325,95
Pulau Laut Kepulauan	Tanjung Lalak Selatan	116,54
Pulau Laut Timur	Berangas	621,55
Pulau Sebuku	Sungai Bali	218,56
Pulau Laut Utara	Dirgahayu	99,45
Pulau Laut Tengah	Salino	591,21
Pulau Laut Sigam	Sigam	36,92
Kelumpang Selatan	Pantai	343,53
Kelumpang Hilir	Serongga	301,10
Kelumpang Hulu	Sungai Kupang	1103,37
Hampang	Hampang	1590,22
Sungai Durian	Manunggul Lama	933,62
Kelumpang Tengah	Tanjung Batu	315,47
Kelumpang Barat	Bungkukan	485,39
Kelumpang Utara	Pudi	218,36
Pamukan Selatan	Tanjung Samalantakan	370,20
Sampanahan	Gunung Batu Besar	404,66
Pamukan Utara	Bakau	571,96
Pamukan Barat	Sengayam	375,87
<b>Kabupaten Kotabaru</b>	<b>Kotabaru</b>	<b>9 480,17</b>

Sumber : BPS Dalam Angka

<sup>23</sup> Kabupaten Kotabaru Dalam Angka 2023, 3.

Kecamatan Subdistrict	Tinggi Wilayah (mdpl) Altitude (m a.s.l)	Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota Distance to the Capital of Regency/ Municipality
(1)	(2)	(3)
Pulau Sembilan	...	150
Pulau Laut Barat	...	100
Pulau Laut Tanjung Selayar	...	114
Pulau Laut Selatan	...	150
Pulau Laut Kepulauan	...	125
Pulau Laut Timur	...	26
Pulau Sebuku	...	46
Pulau Laut Utara	...	...
Pulau Laut Tengah	...	40
Pulau Laut Sigam	...	...
Kelumpang Selatan	...	29
Kelumpang Hilir	...	40
Kelumpang Hulu	...	95
Hampang	...	120
Sungai Durian	...	202
Kelumpang Tengah	...	211
Kelumpang Barat	...	89
Kelumpang Utara	...	73
Pamukan Selatan	...	96
Sampanahan	...	260
Pamukan Utara	...	275
Pamukan Barat	...	230
<b>Kabupaten Kotabaru</b>	...	<b>0</b>

Sumber : BPS Dalam Angka 2023

Penduduk Kabupaten Kotabaru berdasarkan Hasil Proyeksi Interim (2020-2023) sebanyak 334.158 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk per tahun 2020-2022 sebesar 1,49 persen. Sementara itu rasio jenis kelamin tahun 2022 sebesar 107. Kepadatan penduduk di Kabupaten Kotabaru

tahun 2022 sebesar 36 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Pulau Laut Sigam sebesar 1.013 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Hampang sebesar 8 jiwa/ km<sup>2</sup>. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus, penduduk angkatan kerja di Kabupaten Kotabaru tahun 2022 mencapai 160.542 orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja tercatat sebesar 63,96 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,70 persen dan tingkat kesempatan kerja sebesar 93,30.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> *Kabupaten Kotabaru Dalam Angka 2023*, 44.



# **BAB III**

## **TUJUAN & MANFAAT**

### **PENELITIAN**

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. **Menganalisis Potensi Pariwisata:** Melakukan analisis mendalam terhadap potensi pariwisata yang dimiliki oleh Goa Hasan Basry dan Goa Liang Udut, termasuk keunikan alam, budaya, dan sejarahnya. Tujuan ini bertujuan untuk mengidentifikasi daya tarik utama yang dapat menjadi pendorong peningkatan jumlah wisatawan.
- b. **Merumuskan Strategi Pengembangan:** Mengembangkan strategi pengembangan sektor pariwisata yang sesuai dengan karakteristik setempat dan mampu memaksimalkan potensi Goa Hasan Basry dan Goa Liang Udut. Strategi ini harus meliputi upaya pengembangan infrastruktur, promosi, fasilitas akomodasi, dan kegiatan-kegiatan atraktif lainnya.
- c. **Meningkatkan Aksesibilitas:** Mempertimbangkan rencana untuk meningkatkan aksesibilitas menuju Goa Hasan Basry dan Goa Liang Udut, seperti pembangunan jalan, jalur transportasi umum, dan fasilitas pendukung lainnya. Tujuannya adalah untuk memudahkan wisatawan dalam mencapai lokasi wisata.
- d. **Pemberdayaan Masyarakat Lokal:** Meningkatkan peran serta dan keterlibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata. Ini dapat mencakup pelatihan, pembinaan,

dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui sektor pariwisata.

- e. Peningkatan Kualitas Layanan: Meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman wisatawan melalui pelatihan bagi pelaku industri pariwisata, seperti pemandu wisata, pedagang lokal, dan penyedia layanan lainnya. Tujuan ini penting untuk menciptakan kesan positif bagi wisatawan.
- f. Diversifikasi Produk Pariwisata: Merencanakan dan mempromosikan beragam produk pariwisata di Goa Hasan Basry dan Goa Liang Udut, seperti wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, dan wisata petualangan. Diversifikasi ini dapat menarik berbagai jenis wisatawan dengan minat yang berbeda.
- g. Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa pengembangan sektor pariwisata di Goa Hasan Basry dan Goa Liang Udut berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal ini melibatkan pemanfaatan sumber daya secara bijak dan pemeliharaan kelestarian alam dan budaya setempat.
- h. Monitoring dan Evaluasi: Menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi strategi pembangunan pariwisata. Hal ini akan membantu dalam mengukur dampak positif yang dihasilkan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dan perbaikan kondisi ekonomi lokal.

Dengan merancang dan melaksanakan penelitian berdasarkan tujuan-tujuan di atas, diharapkan dapat dikembangkan rencana strategis yang holistik dan berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengembangan sektor pariwisata di Goa Hasan Basry dan Goa Liang Udut di Kecamatan Kalumpang Barat.

#### **b. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah: Melalui pengembangan sektor pariwisata di Goa Hasan Basry dan Goa Liang Udut, diharapkan terjadi peningkatan pendapatan asli daerah melalui pendapatan yang dihasilkan dari wisatawan, seperti biaya tiket masuk, akomodasi, makanan, dan berbagai layanan pendukung lainnya.
- b. Pengembangan Ekonomi Lokal: Pengembangan sektor pariwisata akan mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) di sekitar Goa Hasan Basry dan Goa Liang Udut. Masyarakat lokal akan berpeluang untuk membuka usaha seperti restoran, homestay, toko cinderamata, dan layanan pendukung lainnya, sehingga membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi lokal.
- c. Pemberdayaan Masyarakat: Melalui pelibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata, penduduk setempat akan terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan destinasi wisata.

Hal ini akan memberikan rasa memiliki dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerahnya.

- d. Konservasi dan Pemeliharaan Lingkungan: Penelitian ini dapat memberikan perhatian terhadap perlunya menjaga kelestarian lingkungan alam di sekitar Goa Hasan Basry dan Goa Liang Udut. Dengan menerapkan praktik-praktik berkelanjutan, seperti pengelolaan sampah dan penggunaan sumber daya alam yang bijaksana, dapat dipastikan bahwa pariwisata berkontribusi positif pada lingkungan setempat.
- e. Promosi Budaya dan Warisan: Pengembangan sektor pariwisata dapat menjadi alat untuk mempromosikan budaya dan warisan lokal. Wisatawan akan diperkenalkan pada tradisi, seni, dan adat istiadat masyarakat setempat, yang pada gilirannya dapat membantu melestarikan dan menghargai kekayaan budaya yang dimiliki oleh daerah tersebut.
- f. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas: Dalam upaya mendukung pariwisata, ada peluang untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas umum di sekitar Goa Hasan Basry dan Goa Liang Udut. Peningkatan jalan, sarana transportasi, sanitasi, dan fasilitas lainnya juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.
- g. Peningkatan Kesadaran Wisatawan: Dengan strategi promosi yang tepat, wisatawan akan lebih menyadari potensi wisata di Kecamatan Kalumpang Barat dan Goa Hasan Basry serta Goa Liang Udut. Hal ini



akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan jumlah pengunjung dan mendiversifikasi profil wisatawan yang datang.

- h. Penyediaan Pendapatan Alternatif: Pengembangan pariwisata juga memberikan opsi pendapatan alternatif bagi masyarakat setempat. Ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi lain yang mungkin lebih rentan terhadap fluktuasi ekonomi.
- i. Peningkatan Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan: Seiring dengan perkembangan pariwisata, pemerintah daerah mungkin akan meningkatkan investasi dalam infrastruktur pendidikan dan kesehatan untuk mendukung kebutuhan penduduk lokal dan memenuhi standar pelayanan bagi wisatawan dan masyarakat.
- j. Peningkatan Citra Daerah: Pengembangan pariwisata yang dilakukan dengan baik dapat membantu memperbaiki citra Kecamatan Kalumpang Barat secara keseluruhan, membuatnya menjadi tujuan wisata yang menarik dan memberikan dampak positif pada pembangunan berkelanjutan daerah tersebut.

Manfaat-manfaat ini akan memberikan dampak jangka panjang yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Kalumpang Barat serta membantu menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan beragam bagi penduduk setempat dan wisatawan.



# **BAB IV**

# **METODE PENELITIAN**

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer, selain itu juga diperlukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfungsi untuk melengkapi dan menunjang data yang diperoleh di lapangan. Penelitian kepustakaan ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari 2 (dua) bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bila jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder sebagaimana halnya dalam penelitian hukum normatif, maka studi dokumen dipergunakan sebagai alat pengumpulan data.<sup>25</sup> Berdasarkan data primer dan data sekunder yang terkumpul Peneliti akan melakukan pengkajian dan analisa sehingga dapat ditemukan tujuan khusus dari penelitian ini.

#### **b. Sifat Penelitian**

Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh (*holistik*),

---

<sup>25</sup> Maria SW Soemardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1989), 23.

mendalam dan sistematis tentang Pembangunan Sektor Pariwisata Goa Hasan Basry Dan Goa Liang Udut Di Kecamatan Kalumpang Barat Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dikatakan analitis, karena kemudian akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang diteliti, selain menggambarkan secara jelas tentang asas-asas hukum, kaedah hukum, berbagai pengertian hukum, hasil penelitian di lapangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

### **c. Bahan atau Materi Penelitian**

Untuk penelitian kepustakaan materi penelitian dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

#### **a) Untuk Penelitian Kepustakaan**

- 1) Bahan Hukum Primer terdiri dari: peraturan perundang-undangan mengenai bidang atau sektor pariwisata;
- 2) Bahan Hukum Sekunder terdiri dari: buku-buku, diktat, jurnal hukum, majalah hukum, hasil penelitian dan di internet;

#### **b) Untuk Penelitian Lapangan**

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti Dalam memperoleh data tersebut ditentukan wilayah dan obyek penelitian.

- 2) Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Kotabaru khususnya di Kecamatan Kalumpang Barat.

### 3) Obyek Penelitian

Sebagai obyek penelitian dalam penelitian ini adalah Sektor Pariwisata Goa Hasan Basry Dan Goa Liang Udut Di Kecamatan Kalumpang Barat.

### **c) Jalannya Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian lapangan ini langkah-langkah ditempuh terdiri dari 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:

- b. Tahap Persiapan: Pada tahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan kepustakaan, dilanjutkan dengan penyusunan usulan penelitian.
- c. Tahap Pelaksanaan: Pada tahap ini penelitian kepustakaan dilakukan dengan maksud pengumpulan data dan pengkajian terhadap data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian lapangan dilakukan pengumpulan data primer melalui observasi.
- d. Tahap Penyelesaian: Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yaitu penulisan laporan awal hasil penelitian dan menganalisis yang dilanjutkan dengan konsultasi serta perbaikan dan diakhiri dengan laporan akhir.

#### **d) Analisis Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang telah terkumpul baik dari hasil observasi maupun hasil dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan (pemecahan dari masalah yang akan dibahas). Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu data diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari.



**BAB V**  
**HASIL DAN LUARAN**  
**YANG DICAPAI**

## **BAB V**

### **HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI**

#### **A. Peningkatan Infrastruktur Pendukung Dan Strategi Promosi Pariwisata**

Indonesia, dengan segenap keelokan alam dan kekayaan budayanya yang tak terhingga, sungguh menjadi salah satu negara yang diberkahi dengan potensi pariwisata yang luar biasa. Menyelimuti seluruh kepulauan dari Sabang di ujung barat hingga Merauke di ujung timur, Indonesia menghadirkan keanekaragaman yang begitu mengagumkan.

Di berbagai sudut tanah air ini, dapat dirasakan pesona alam yang memukau, mulai dari pantai-pantai berpasir putih yang terhampar luas hingga gunung-gunung megah yang menjulang tinggi. Hutan-hutan lebat dengan flora dan fauna yang eksotis turut memperkaya pengalaman wisata alam yang tak terlupakan.

Namun, potensi pariwisata Indonesia tak hanya terbatas pada keindahan alam semata. Lebih dari itu, keramahan luar biasa yang ditunjukkan oleh masyarakat setempat akan membuat setiap wisatawan merasa seperti di rumah sendiri. Di setiap kunjungan, kita juga dapat merasakan beragam kearifan budaya yang tumbuh subur di setiap daerah, menawarkan pengalaman budaya yang berbeda-beda dan unik. Dengan segala kekayaan ini, pariwisata Indonesia sungguh menjadi salah satu yang paling lengkap dan menakjubkan di dunia, memberikan setiap pelancong pengalaman yang mendalam dan tak terlupakan dalam setiap perjalanannya.



Dengan potensi alam yang dimiliki maka salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui pembangunan, karena pembangunan merupakan suatu proses perubahan dalam segala bidang kehidupan, yang dilakukan secara sadar berdasarkan suatu rencana

tertentu. Pembangunan nasional di Indonesia misalnya, merupakan suatu proses perubahan yang didasarkan pada suatu rencana tertentu, yang dilakukan secara sadar dan penuh terencana baik dari pemerintah maupun masyarakat yang merupakan garda terdepan dalam pembangunan.

Pembangunan ini dimaksudkan bertujuan pada peningkatan taraf hidup masyarakat baik melalui aspek spiritual maupun secara aspek material karena bagaimanapun dengan adanya pembangunan itu diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya, karena itulah maka pembangunan ini menjadi salah satu aspek penting untuk pencapaian tujuan tersebut:

- a. Pembangunan disini dimaksudkan harus bersifat realistis artinya dapat dilaksanakan melalui sebuah pertimbangan dan kajian yang komprehensif pula;
- b. Perlunya *planning* pembangunan dan proses pembangunan yang mana dimaksudkan agar dalam usaha pembangunan tersebut dilakukan secara terkoordinasi baik secara aspek kelembagaan maupun aspek kebijakan yang akan diambil;
- c. Adanya peningkatan produktivitas melalui pembangunan ini diharapkan nantinya ada progress yang terukur dan dievaluasi secara kontinyu; dan
- d. Peningkatan standar kehidupan masyarakat, hal ini terkait dengan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat pula pada akhirnya, karena hasil inilah nantinya yang diharapkan atau diinginkan dari sebuah proses pembangunan tersebut.

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Sondang P. Siagian, *Analisis serta perumusan kebijaksanaan dan strategi organisasi* (Jakarta: Haji Masagung, 1994), 38.

Pengertian yang lebih sederhana dikemukakan oleh Ginanjar Kartasasmita bahwa pembangunan yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.<sup>27</sup> Sedangkan menurut Mohammad Ali, pembangunan adalah segala upaya yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan kualitas manusia.<sup>28</sup> Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu usaha dalam proses perubahan yang dilakukan secara terencana untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara keberadaan infrastruktur sangat penting di setiap negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk dapat menunjang aktivitas masyarakat guna mencapai kesejahteraan, masyarakat memerlukan pelayanan atau fasilitas yang dapat menjungnya dalam segala aktivitas. Berbagai layanan yang dapat memudahkan masyarakat dalam kegiatan tersebut disebut infrastruktur.

Disamping itu, infrastruktur juga mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, terutama distribusi arus produksi barang dan jasa. Sebagai salah satu contohnya, jalan dapat menjadi penghubung yang penting untuk sarana transportasi darat, baik untuk angkutan barang maupun angkutan lainnya. Infrastruktur, dalam pengertian yang lebih umum, merujuk pada sekumpulan fasilitas dan aset fisik yang membentuk kerangka kerja yang diperlukan untuk mendukung fungsi ekonomi, sosial,

dan lingkungan suatu daerah.

---

<sup>27</sup> Ginandjar Kartasmita, *Pembangunan untuk rakyat: memadukan pertumbuhan dan pemerataan* (Jakarta: Cides, 1996), 38.

<sup>28</sup> Mohammad Ali, *Pendidikan untuk pembangunan nasional: menuju bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya saing tinggi* (Jakarta: Grasindo, 2009), 46.

Secara definisi, infrastruktur merupakan rangkaian sistem yang mencakup jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, rel kereta api, saluran air, serta sarana listrik dan komunikasi. Semua ini adalah elemen-elemen kunci yang menjadikan suatu wilayah mampu berfungsi secara efisien dalam menghubungkan masyarakat, menggerakkan ekonomi, dan memberikan pelayanan publik yang diperlukan. Infrastruktur juga berperan dalam membentuk kualitas hidup manusia dan meningkatkan kapasitas produktifitas suatu daerah.

Infrastruktur berperan dalam pembangunan wilayah sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dan alam. Dengan kata lain, infrastruktur merupakan aset fisik yang penting sebagai strategi penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan, infrastruktur bukan hanya sebagai alat transportasi semata, tetapi juga sebagai penopang ekonomi lokal, meningkatkan konektivitas regional, dan membuka peluang investasi serta pertumbuhan sektor industri.

Dalam era globalisasi ini, peran infrastruktur semakin penting, baik dalam skala lokal maupun internasional. Investasi yang tepat dalam pengembangan infrastruktur dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat integrasi wilayah. Oleh karena itu, pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai perkembangan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara

keseluruhan.

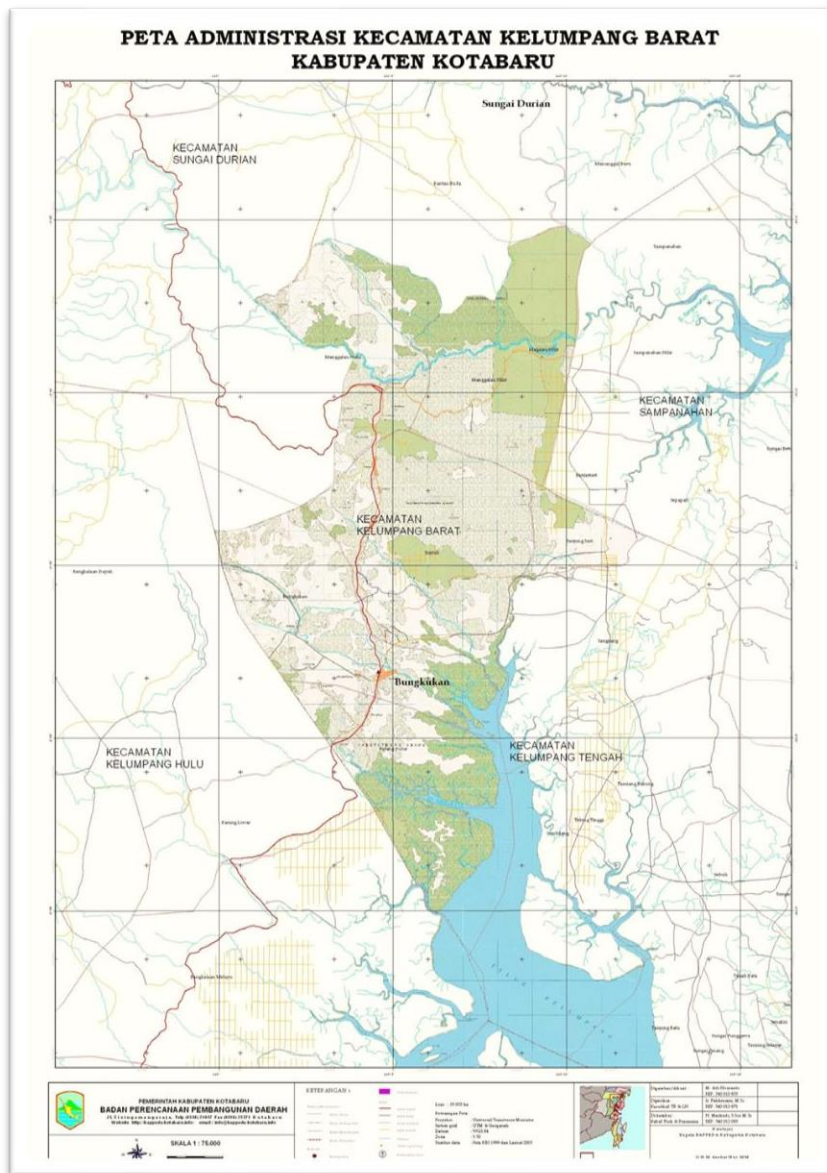
Namun, peran infrastruktur tidak hanya berpengaruh pada pengembangan wilayah secara umum, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada sektor pariwisata. Sebagai contohnya, jalan-jalan yang baik, pelabuhan udara yang modern, pelabuhan laut

yang efisien, dan fasilitas penginapan yang memadai sangat penting dalam melancarkan akses wisatawan ke tempat-tempat wisata. Infrastruktur ini juga berfungsi sebagai mediator penting untuk ekonomi masyarakat lokal yang tinggal di sekitar destinasi pariwisata tersebut. Selain itu, infrastruktur yang baik juga berperan krusial dalam mendorong kualitas pengalaman wisatawan itu sendiri. Dengan adanya akses yang mudah dan fasilitas yang memadai, wisatawan dapat menjelajahi destinasi dengan lebih nyaman dan efisien. Hal ini berdampak positif pada kepuasan mereka dan mendorong mereka untuk kembali atau merekomendasikan destinasi tersebut kepada orang lain.

Namun, perlu diingat bahwa pengembangan infrastruktur pariwisata harus seimbang dengan pelestarian lingkungan. Maka dari itu, pembangunan infrastruktur pariwisata yang berkelanjutan harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan pelestarian alam untuk memastikan bahwa keindahan alam dan budaya yang menjadi daya tarik wisata tetap terjaga untuk generasi mendatang.

Dalam konteks ini, infrastruktur menjadi tulang punggung yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, dengan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian kekayaan alam dan budaya yang dimiliki oleh suatu daerah. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur pariwisata yang cermat dan berkelanjutan adalah elemen kunci dalam mempromosikan pariwisata yang berdaya guna dan berkelanjutan.





Saat ini lokasi Goa Hasan Basry dan Goa Liang Udut memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sarana pariwisata di Kabupaten Kotabaru, yang keduanya berlokasi di Kecamatan Kalumpang Barat. Secara umum luas wilayah Kecamatan Kalumpang Barat adalah sebesar 545,15 km<sup>2</sup> dengan rincian sebagai berikut:

Desa/Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap Luas Kecamatan
Batang Kulur	108,52	19,90
Bungkulon	73,64	13,50

Siayuh	148,18	27,18
Tanjung Sari	5,00	0,91
Magalau Hilir	107,28	19,67
Magalau Hulu	102,53	18,80
<b>Kecamatan Kelumpang Barat</b>	<b>545,15</b>	<b>100</b>

Sumber : Kecamatan Kalumpang Barat

Kecamatan Kelumpang Barat adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Kotabaru, secara keseluruhan Kecamatan Kelumpang Barat memiliki luas sebesar 545,15 km<sup>2</sup>. Secara astronomis, Kecamatan Kelumpang Barat terletak antara 02042'08" - 03006'08" Lintang Selatan sampai dengan 115050'11" - 116006'57" Bujur Timur. Sebelah utara wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Sungai Durian, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kelumpang Hulu, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kelumpang Tengah, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Hampang. Secara administratif, Kecamatan Kelumpang Barat memiliki 6 desa yaitu Batang Kulur, Bungkukan, Siayuh, Tanjung Sari, Magalau Hilir dan Magalau Hulu. Desa terluas di Kecamatan Kelumpang Barat adalah Desa Siayuh dengan luas 148,18 km<sup>2</sup>, atau sekitar 27,8% dari luas Kecamatan Kelumpang Barat. Sementara Desa Bungkukan sebagai Ibukota Kecamatan memiliki luas sebesar 73,64 m<sup>2</sup>, atau sekitar 13,50% dari luas Kecamatan Kelumpang Barat. Jarak yang ditempuh oleh masyarakat Kecamatan Kelumpang Barat apabila ingin menuju Ibukota Kabupaten memerlukan jarak sejauh 100-175 km.

<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Jarak ke Ibukota Kecamatan (km)</b>	<b>Jarak ke Ibukota Kabupaten/ Kota (km)</b>
Batang Kulur	5	109
Bungkukan	1	100
Siayuh	5	100
Tanjung Sari	15	120
Magalau Hilir	31	140
Magalau Hulu	18	175

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2021

Kecamatan Kelumpang Barat dibagi menjadi 6 desa, sementara masing- masing desa terbagi menjadi wilayah Rukun Tetangga (RT). Terdapat total sebanyak 52 RT di Kecamatan Kelumpang Barat dengan Desa Siayuh dan Desa Tanjung Sari memiliki jumlah RT yang terbanyak yaitu 12 RT dan Magalau Hilir memiliki RT yang paling sedikit yaitu sebesar 5 RT saja.

Sarana infrastruktur pendukung di Kecamatan Kalumpang Barat mencerminkan pola kehidupan masyarakat setempat yang bersifat beragam. Sebagian besar penduduk Kecamatan Kalumpang Barat mengandalkan air minum yang mereka peroleh dari sumber air isi ulang dan sumur sebagai sumber utama pasokan air minum mereka, dengan perluasan jaringan distribusi air minum yang masih menjadi salah satu tantangan yang perlu diatasi.

Di bidang listrik, mayoritas penduduk di kecamatan ini telah berhasil terhubung ke jaringan listrik nasional yang dikelola oleh PLN, menawarkan akses ke energi listrik yang penting dalam mendukung berbagai aspek

kehidupan sehari-hari. Walaupun demikian, kami harus mencatat bahwa masih ada 38 keluarga yang belum terhubung ke sumber listrik, sehingga ada upaya yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari listrik sebagai sarana utama untuk berbagai keperluan, termasuk penerangan dan perkembangan ekonomi.

Dalam hal bahan bakar memasak, masyarakat Kalumpang Barat mengandalkan berbagai jenis, mulai dari elpiji dalam berbagai ukuran yang nyaman digunakan dalam kegiatan memasak sehari-hari, hingga minyak tanah dan kayu yang tetap menjadi alternatif penting dalam situasi tertentu. Penggunaan yang beragam ini mencerminkan keragaman budaya dan kebutuhan masyarakat, dan juga menunjukkan pentingnya edukasi terkait penggunaan bahan bakar yang efisien dan ramah lingkungan.

Namun, terkait dengan penerangan di jalan, kami catat bahwa hanya dua desa yang saat ini telah memiliki penerangan di jalan utamanya, yang dapat membantu meningkatkan tingkat keamanan dan kenyamanan dalam aktivitas malam hari serta memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Ini menyoroti perlunya investasi lebih lanjut dalam infrastruktur jalan dan pencahayaan di daerah ini.

Terakhir, dalam konteks fasilitas keagamaan atau peribadatan, kecamatan ini memiliki beragam tempat ibadah yang tersedia untuk masyarakat, termasuk 7 masjid, 15 mushola, 3 gereja Protestan, 1 gereja Katolik, dan 2 wihara. Keanekaragaman tempat ibadah ini mencerminkan

keragaman keyakinan agama di komunitas ini dan memberikan warga akses yang luas untuk mengejar praktek keagamaan mereka..

Jenis Sarana Kesehatan	2021
Rumah Sakit	0
Rumah Sakit Bersalin	0
Poliklinik/Balai Pengobatan	1
Puskesmas Rawat Inap	0
Puskesmas Tanpa Rawat Inap	1
Apotek	0

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2021

Sumber Air Minum	2021
Air Kemasan Bermerk	0
Air Isi Ulang	4
Leding Dengan Meteran	0
Leding Tanpa Meteran	0
Sumur Bor atau Pompa	0
Sumur	0
Mata Air	1
Sungai/Danau/Kolam/ Waduk/Situ/ Embung/Bendungan	0
Air Hujan	0
Lainnya	1

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2021

Sumber Penerangan Jalan Utama	2021
Listrik Pemerintah	2
Listrik Non Pemerintah	1
Non Listrik	0

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2021

Sarana transportasi dan komunikasi adalah dua aspek yang sangat penting dalam pengembangan sektor pariwisata di suatu wilayah. Dalam konteks Kecamatan Kelumpang Barat, kami akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai kondisi dan ketersediaan sarana ini.

**Sarana Transportasi:** Di Kecamatan Kelumpang Barat, tersedia sarana transportasi darat dengan trayek yang tetap, yang memungkinkan aksesibilitas ke berbagai daerah di kecamatan ini. Namun, perlu dicatat bahwa satu desa, yaitu Desa Tanjung Sari, masih belum memiliki akses transportasi angkutan umum. Ini mungkin menjadi tantangan dalam memfasilitasi pergerakan penduduk di desa tersebut dan potensi wisata yang dapat dikembangkan di sana.

Selain itu, sebagian besar jalan di kecamatan ini telah diaspal atau dibeton, memberikan akses yang baik sepanjang tahun, kecuali pada saat-saat tertentu seperti saat terendam banjir. Meskipun beberapa desa mungkin mengalami masalah terkait jalan yang masih diperkeras dengan kerikil dan batu, upaya pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan perjalanan wisatawan.

**Sarana Penginapan:** Dalam hal penginapan, hanya satu penginapan yang tersedia di Desa Magalau Hulu. Keterbatasan opsi penginapan ini dapat menjadi kendala dalam menarik wisatawan yang mencari variasi akomodasi. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur penginapan tambahan mungkin perlu dipertimbangkan untuk mendukung industri pariwisata di kecamatan ini.

Sarana dan Prasarana Komunikasi: Di Kecamatan Kelumpang Barat, terdapat enam menara telepon seluler dengan empat operator telepon seluler yang beroperasi. Meskipun sebagian besar wilayah memiliki sinyal telepon seluler yang cukup kuat, Desa Siayuh dan Magalau Hilir menghadapi tantangan dalam hal sinyal yang lemah, yang hanya mencapai 2,5G. Ini dapat menjadi faktor penghambat dalam keterjangkauan komunikasi di daerah tersebut, terutama dalam mengakses internet dan layanan berbasis data. Perbaikan atau peningkatan infrastruktur komunikasi dapat membantu memastikan bahwa seluruh kecamatan memiliki akses yang setara terhadap teknologi komunikasi modern.

Secara keseluruhan, sarana transportasi, penginapan, dan prasarana komunikasi adalah elemen-elemen kunci yang perlu dipertimbangkan dalam upaya pengembangan sektor pariwisata di Kecamatan Kelumpang Barat. Dengan peningkatan aksesibilitas dan ketersediaan akomodasi, serta peningkatan infrastruktur komunikasi, kecamatan ini memiliki potensi untuk menjadi tujuan pariwisata yang lebih menarik dan berdaya saing.

<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Hotel</b>	<b>Penginapan</b>
Batang Kulur	0	0
Bungkukan	0	0
Siayuh	0	0
Tanjung Sari	0	0
Magalau Hilir	0	0
Magalau Hulu	0	1

Sumber :BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2021

Desa/Kelurahan	Jenis Prasarana Transportasi	Keberadaan Angkutan Umum
Batang Kulur	Darat	Ada, dengan trayek tetap
Bungkukan	Darat	Ada, dengan trayek tetap
Siayuh	Darat	Ada, dengan trayek tetap
Tanjung Sari	Darat	Tidak ada angkutan umum
Magalau Hilir	Darat	Ada, tanpa trayek tetap
Magalau Hulu	Darat	Ada, dengan trayek tetap

Sumber :BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2021

Desa/Kelurahan	Jenis Permukaan Jalan Darat Terluas	Dapat Dilalui Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih
Batang Kulur	Aspal/beton	Sepanjang tahun
Bungkukan	Aspal/beton	Sepanjang tahun
Siayuh	Aspal/beton	Sepanjang tahun
Tanjung Sari	Diperkeras (kerikil, batu, dll)	Sepanjang tahun, kecuali saat tertentu
Magalau Hilir	Aspal/beton	Sepanjang tahun
Magalau Hulu	Aspal/beton	Sepanjang tahun

Sumber :BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2021

Desa/Kelurahan	Jumlah Menara Telepon seluler	Jumlah Operator Layanan Komunikasi Ponsel
Batang Kulur	3	4
Bungkukan	1	3
Siayuh	0	2
Tanjung Sari	1	2
Magalau Hilir	0	4
Magalau Hulu	1	2
Kecamatan Kelumpang Barat	6	17

Sumber :BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2021



<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Kekuatan Sinyal Telepon Seluler</b>	<b>Jenis Sinyal Internet Telepon Seluler</b>
Batang Kulur	Sinyal Kuat	Tidak ada sinyal internet G/LTE
Bungkukan	Sinyal Kuat	Tidak ada sinyal internet G/LTE
Siayuh	Sinyal Lemah	2,5G/E/GPRSG/H/H+/EVDO
Tanjung Sari	Sinyal Kuat	Tidak ada sinyal internet G/LTE
Magalau Hilir	Sinyal Lemah	Tidak ada sinyal internet G/LTE
Magalau Hulu	Sinyal Kuat	Tidak ada sinyal internet G/LTE

Sumber :BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2021

Dalam konteks sarana dan prasarana di bidang ekonomi dan perdagangan, Kecamatan Kelumpang Barat memiliki sejumlah fasilitas yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Sarana ini berperan penting dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di daerah ini.

Sarana dan Prasarana Perbankan: Di Kecamatan Kelumpang Barat, terdapat satu Koperasi Unit Desa yang berlokasi di Desa Tanjung Sari. Koperasi ini memainkan peran penting dalam menyediakan layanan perbankan dan kredit kepada masyarakat lokal. Meskipun hanya terdapat satu lembaga perbankan dalam bentuk koperasi, perannya dalam mendukung kegiatan ekonomi dan perkembangan usaha mikro dan kecil di daerah ini sangatlah penting.

Sarana dan Prasarana Perdagangan: Kelumpang Barat memiliki dua pasar dengan bangunan semi permanen yang terletak di Desa Bungkukan dan Magalau Hulu. Pasar-pasar ini adalah pusat perdagangan lokal di mana masyarakat dapat menjual dan membeli berbagai jenis

barang dagangan. Meskipun pasar tradisional masih dominan, perluasan prasarana perdagangan dengan sistem swalayan seperti minimarket atau supermarket belum tersedia di kecamatan ini. Demikian pula, belum ada restoran atau rumah makan yang beroperasi di wilayah ini.

Prasarana perdagangan lainnya yang tersedia di Kelumpang Barat meliputi pasar tanpa bangunan, warung, atau toko kelontong. Pasar-pasar tanpa bangunan ini sering digunakan oleh pedagang lokal untuk berjualan hasil pertanian dan produk-produk sehari-hari. Selain itu, makanan dan minuman dapat ditemukan melalui warung-warung makan dan pedagang keliling.

Dalam mengembangkan sektor ekonomi dan perdagangan di Kelumpang Barat, langkah-langkah strategis dapat termasuk pengembangan prasarana pasar, promosi usaha mikro dan kecil, serta peningkatan diversifikasi bisnis seperti restoran atau usaha swalayan modern. Ini akan membantu meningkatkan aksesibilitas barang dan jasa, meningkatkan peluang usaha lokal, dan memperkuat ekonomi masyarakat setempat.

<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Bank Umum Pemerintah</b>	<b>Bank Umum Swasta</b>	<b>Bank Perkreditan Rakyat (BPR)</b>
Batang Kulur	0	0	0
Bungkukan	0	0	0
Siyuh	0	0	0
Tanjung Sari	0	0	0
Magalau Hilir	0	0	0

Magalau Hulu	0	0	0
Kecamatan Kelumpang Barat	0	0	0

Sumber :BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2021

Desa/Kelurahan	Koperasi Unit Desa (KUD)	Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra)	Koperasi Simpan Pinjam (Kospin)	Koperasi Lainnya
Batang Kulur	0	0	0	0
Bungkukan	0	0	0	0
Siayuh	0	0	0	0
Tanjung Sari	1	0	0	0
Magalau Hilir	0	0	0	0
Magalau Hulu	0	0	0	0
Kec Kelumpang Barat	1	0	0	0

Sumber :BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2021

Desa/ Kelurahan	Pertokoan	Pasar dengan Bangunan Permanen	Pasar dengan Bangunan Semi Permanen	Pasar tanpa Bangunan	Mini Market/ Swalayan/ Supermarket	Restoran/ Rumah Makan
Batang Kulur	0	0	0	0	0	0
Bungkukan	0	0	1	0	0	0
Siayuh	0	0	0	1	0	0
Tanjung Sari	0	0	0	0	0	0
Magalau Hilir	0	0	0	0	0	0
Magalau Hulu	0	0	1	0	0	0

Kec	0	0	2	1	0	0
Kelumpang Barat						

Sumber :BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2021

Dengan sarana dan prasarana yang ada jika dikaitkan dengan pengembangan pariwisata daerah tersebut maka terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan.

Pertama, infrastruktur ekonomi yang ada, termasuk perbankan dan koperasi, dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata. Misalnya, koperasi dapat berperan dalam memberikan pinjaman kepada warga setempat yang ingin membuka usaha yang terkait dengan pariwisata, seperti homestay atau warung makan tradisional. Ini dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil di sektor pariwisata.

Kedua, prasarana perdagangan, terutama pasar tradisional, dapat menjadi tempat bagi para pelaku usaha lokal untuk menjual produk-produk yang menarik bagi wisatawan, seperti kerajinan tangan atau makanan khas daerah. Dengan meningkatkan fasilitas dan promosi pasar lokal, daerah ini dapat menarik lebih banyak wisatawan yang tertarik untuk berbelanja barang-barang unik dan mencicipi kuliner lokal.

Namun, perlu diingat bahwa pengembangan pariwisata yang berkelanjutan juga harus mempertimbangkan pelestarian lingkungan dan budaya. Oleh karena itu, dalam membangun infrastruktur pariwisata dan mengembangkan sektor ekonomi terkait, penting untuk memastikan bahwa tindakan ini sejalan dengan pelestarian alam dan budaya daerah ini,

sehingga keindahan alam dan kearifan lokal tetap terjaga dan dapat dinikmati oleh wisatawan jangka panjang.

Secara keseluruhan, pengembangan sarana dan prasarana ekonomi serta perdagangan dapat menjadi pendukung yang penting dalam upaya memajukan sektor pariwisata di Kelumpang Barat, dengan potensi untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menghasilkan pengalaman wisata yang lebih memuaskan bagi para pengunjung.

Pengembangan pariwisata di kedua goa tersebut adalah sebuah tantangan yang membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup dua aspek utama: infrastruktur pendukung dan strategi promosi pariwisata yang efektif. Permasalahan infrastruktur yang dihadapi termasuk akses jalan yang seringkali sulit diakses, fasilitas sanitasi yang terbatas, serta kurangnya fasilitas pendukung lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas dan kenyamanan pengalaman wisatawan.

### **1. Perbaikan Infrastruktur Pendukung:**

Langkah pertama dalam mengatasi masalah ini adalah dengan fokus pada perbaikan infrastruktur pendukung. Ini termasuk investasi dalam pembaruan dan perbaikan jaringan jalan menuju kedua goa. Diperlukan pemeliharaan rutin serta evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa akses jalan tersebut memenuhi standar yang diperlukan untuk mendukung volume pengunjung yang diinginkan.

Selain itu, penting untuk memprioritaskan fasilitas sanitasi yang memadai. Dengan menyediakan toilet umum yang bersih dan terawat dengan baik, serta tempat sampah yang memadai, akan memberikan kenyamanan ekstra bagi pengunjung. Pembenahan fasilitas parkir juga merupakan langkah penting, memastikan bahwa wisatawan memiliki tempat aman dan teratur untuk memarkir kendaraan mereka.

Pusat Informasi Wisata adalah sarana penting yang dapat membantu wisatawan dalam merencanakan kunjungan mereka. Ini harus menyediakan informasi yang akurat dan terbaru tentang atraksi lokal, rute wisata, serta fasilitas yang tersedia di sekitar goa. Seiring dengan itu, pemeriksaan dan peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan penyediaan fasilitas pengisian daya untuk perangkat elektronik di seluruh area pariwisata akan meningkatkan daya tarik bagi berbagai jenis pengunjung.

## **2. Strategi Promosi Pariwisata yang Efektif:**

Pengembangan infrastruktur pendukung harus didampingi dengan strategi promosi pariwisata yang terencana dengan baik. Pemasaran digital adalah kunci dalam mencapai audiens yang lebih luas. Ini mencakup pengembangan dan pemeliharaan situs web resmi yang informatif dan interaktif, serta penggunaan media sosial untuk membagikan konten berkualitas tinggi yang menarik minat wisatawan potensial.

Kerjasama dengan agen perjalanan lokal dan internasional adalah cara lain untuk memperkenalkan destinasi ini kepada target pasar yang lebih besar. Kampanye iklan yang ditargetkan dengan tepat dapat memberikan dorongan signifikan terhadap kesadaran masyarakat terhadap keindahan dan potensi wisata dari kedua goa tersebut.

Konten visual yang memukau, seperti video dan foto profesional yang menampilkan keindahan alam dan kekayaan budaya di sekitar goa, akan memancing minat wisatawan potensial. Kolaborasi dengan influencer atau pembuat konten lokal atau regional juga akan membawa keuntungan positif dalam memperluas jangkauan promosi. Adalah penting untuk memasukkan pendapat dan kebutuhan masyarakat setempat dalam strategi promosi ini. Kolaborasi dengan komunitas lokal dalam pengembangan dan pemasaran pariwisata tidak hanya akan memastikan keterlibatan yang kuat, tetapi juga akan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan pada ekonomi lokal.

### **3. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan:**

Implementasi semua langkah ini harus diiringi oleh pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Analisis data kunjungan, umpan balik dari wisatawan, dan evaluasi kinerja kampanye promosi akan memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan dan menyesuaikan strategi di masa depan. Selain itu, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan

tren pariwisata dan kebutuhan pasar adalah kunci keberhasilan jangka panjang.

Melalui pendekatan komprehensif ini, diharapkan kedua goa tersebut akan dapat menarik lebih banyak wisatawan dan memberikan pengalaman pariwisata yang tak terlupakan. Tidak hanya akan meningkatkan ekonomi lokal, tetapi juga akan memastikan bahwa keindahan alam dan kekayaan budaya dari kedua goa tersebut tetap terjaga dan dinikmati oleh generasi mendatang.

#### **4. Keterlibatan Masyarakat Lokal dan Keberlanjutan Lingkungan:**

Selain fokus pada infrastruktur dan promosi pariwisata, penting juga untuk memperhatikan keterlibatan masyarakat lokal dan dampak lingkungan dalam pengembangan pariwisata. Keterlibatan masyarakat setempat adalah faktor penting dalam memastikan keberlanjutan dan manfaat ekonomi yang berkelanjutan dari sektor pariwisata.

Masyarakat setempat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata. Mereka memiliki pengetahuan lokal yang berharga dan dapat memberikan wawasan tentang cara menjaga keseimbangan antara perkembangan pariwisata dan pelestarian budaya dan alam. Program pelibatan masyarakat setempat, seperti pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas, dapat membantu mereka menjadi mitra yang efektif dalam mengelola destinasi pariwisata.



Selain itu, perlu ada upaya serius untuk mengurangi dampak lingkungan dari peningkatan kunjungan wisatawan. Dengan jumlah pengunjung yang meningkat, ekosistem alami di sekitar goa dapat mengalami tekanan yang signifikan. Oleh karena itu, perencanaan berkelanjutan, pengelolaan limbah yang baik, dan praktik pariwisata yang ramah lingkungan harus diterapkan.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal pengelolaan lingkungan, pemantauan kualitas air dan udara, serta perlindungan warisan budaya sangat penting. Program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi tenaga kerja lokal juga dapat membantu meningkatkan kualitas layanan pariwisata, sehingga pengalaman wisatawan menjadi lebih baik.

## **B. Partisipasi Masyarakat Setempat Dalam Pengembangan Pariwisata Yang Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan**

Kesejahteraan masyarakat adalah pijakan penting dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Ketika destinasi pariwisata dikelola dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat, hasilnya dapat sangat positif. Salah satu cara terpenting untuk mencapai ini adalah melibatkan masyarakat setempat dalam semua tahap pengembangan pariwisata, dari perencanaan hingga pelaksanaan.

- a. **Peluang Ekonomi:** Industri pariwisata dapat menciptakan peluang ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat. Ini bisa berupa pekerjaan langsung dalam sektor pariwisata, seperti pemandu wisata, pengelola homestay, atau pengrajin kerajinan lokal. Selain itu, pariwisata juga merangsang sektor lain, seperti perdagangan dan pertanian, yang dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.
- b. **Pendidikan dan Pelatihan:** Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan sering kali melibatkan pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat setempat. Hal ini membantu mereka untuk mendapatkan keterampilan yang diperlukan dalam industri pariwisata dan meningkatkan daya saing mereka di pasar tenaga kerja.
- c. **Pelestarian Budaya:** Kesejahteraan masyarakat juga terkait erat dengan pelestarian budaya. Pariwisata yang berkelanjutan dapat membantu memelihara dan mempromosikan budaya dan tradisi lokal. Masyarakat setempat dapat berperan sebagai penjaga budaya, membagikan pengetahuan mereka dengan wisatawan, dan memastikan bahwa warisan budaya mereka tetap hidup.
- d. **Kesehatan dan Infrastruktur:** Pengembangan pariwisata yang baik juga mencakup perbaikan infrastruktur dan layanan kesehatan untuk masyarakat setempat. Ini termasuk pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, dan sistem sanitasi yang lebih baik, yang dapat meningkatkan kesejahteraan fisik dan sosial masyarakat setempat.

e. Pengelolaan Lingkungan: Kesejahteraan masyarakat juga terkait dengan pelestarian lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan lingkungan, dapat dipastikan bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup mereka terlindungi untuk generasi mendatang.

Namun, untuk mencapai hubungan yang seimbang antara pariwisata dan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya tindakan yang bijak dan tanggung jawab dari semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan wisatawan. Pendidikan dan kesadaran juga penting dalam memastikan bahwa pariwisata berkelanjutan dapat menjadi pendorong nyata untuk kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan atau budaya setempat. Dalam konteks yang tepat, pariwisata dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan menciptakan hubungan yang positif antara wisatawan dan tuan rumah.

Sebagai gambaran kondisi penduduk yang berada di Kecamatan Kalumpang Barat Kecamatan Kalumpang Barat memiliki jumlah penduduk sebesar 7.411 orang. Dari jumlah penduduk tersebut, 3.824 orang merupakan penduduk berjenis kelamin laki-laki, sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan ada sebanyak 3.587 orang. Sehingga, rasio jenis kelamin penduduk Kalumpang Barat adalah sebesar 106,60, yang artinya bahwa setiap 100 penduduk berjenis kelamin perempuan terdapat 106 sampai 107 penduduk berjenis kelamin laki-laki.

Dengan luas kecamatan sebesar 545,15 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk di Kecamatan Kelumpang Barat adalah sebesar 13,59 penduduk per km<sup>2</sup> atau dapat diartikan terdapat 13 sampai 14 penduduk setiap satu kilometer persegi di Kecamatan Kelumpang Barat. Desa dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Kelumpang Barat adalah Desa Tanjung Sari dengan kepadatan penduduk sebesar 249,8 penduduk per km<sup>2</sup>, sementara kepadatan penduduk terendah adalah Desa Siayuh yaitu sebesar 6,39 penduduk per km<sup>2</sup>.

Desa/Kelurahan	Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Batang Kulur	933	860	1.793
Bungkukan	703	693	1.396
Siayuh	497	451	948
Tanjung Sari	640	609	1.249
Magalau Hilir	492	436	928
Magalau Hulu	559	538	1.097
<b>Kecamatan Kelumpang Barat</b>	<b>3.824</b>	<b>3.587</b>	<b>7.411</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotabaru

Desa/Kelurahan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (per km <sup>2</sup> )	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Batang Kulur	24,19	17	108
Bungkukan	18,84	19	101
Siayuh	12,79	6	110
Tanjung Sari	16,85	250	105
Magalau Hilir	12,52	9	113
Magalau Hulu	14,80	11	104

<b>Kecamatan Kelumpang Barat</b>	100	14	107
----------------------------------	-----	----	-----

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotabaru

Kesejahteraan masyarakat dalam konteks pariwisata sangat erat kaitannya dengan potensi penduduk setempat. Potensi penduduk mencakup segala hal yang bisa mereka tawarkan, mulai dari keterampilan unik, pengetahuan lokal, hingga kebudayaan dan tradisi yang dapat menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Sebagai contoh, mari bayangkan sebuah desa pesisir yang menjadi destinasi pariwisata.

Penduduk setempat di desa ini memiliki pengetahuan yang mendalam tentang cara menjaring ikan secara tradisional. Dengan adanya pengembangan pariwisata berkelanjutan, potensi penduduk ini bisa dioptimalkan. Masyarakat setempat dapat melibatkan wisatawan dalam pengalaman menjaring ikan, mengajar mereka tentang teknik-teknik yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hal ini bukan hanya memberikan pengalaman autentik bagi wisatawan, tetapi juga menciptakan peluang kerja tambahan bagi penduduk setempat. Dalam hal ini, potensi penduduk dalam hal pengetahuan dan keterampilan lokal menjadi salah satu pendorong utama kesejahteraan mereka.

Selain itu, potensi penduduk juga bisa digunakan dalam pengembangan produk lokal. Masyarakat setempat dapat menghasilkan barang-barang kerajinan tangan, seni, atau makanan khas yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Melalui promosi produk-produk ini kepada pengunjung, penduduk setempat dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Ini adalah contoh lain tentang bagaimana potensi penduduk dan kesejahteraan masyarakat dapat terjalin erat dengan industri pariwisata yang berkelanjutan.

Dengan melibatkan penduduk setempat dan memanfaatkan potensi mereka, pariwisata dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menciptakan lingkungan yang saling menguntungkan antara wisatawan dan tuan rumah, di mana pengalaman yang autentik, produk lokal, dan pengetahuan lokal semuanya berperan dalam menciptakan destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan adalah tujuan yang sangat penting untuk memastikan bahwa destinasi wisata tetap terjaga dan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang, sambil tetap mempertahankan kelestarian lingkungan alam dan budaya yang sangat berharga. Dalam konteks kedua goa yang menjadi fokus, peran masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemeliharaan pariwisata berkelanjutan adalah elemen yang krusial. Mari kita mempertimbangkan berbagai aspek tentang bagaimana melibatkan masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata sambil menjaga keberlanjutan lingkungan di sekitar goa tersebut, dengan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan:

Langkah pertama dalam melibatkan masyarakat setempat adalah dengan memberi mereka suara dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata. Membentuk forum konsultasi atau kelompok kerja yang terdiri dari warga setempat dapat memberikan wadah bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi, keprihatinan, dan ide-ide mereka. Keputusan-keputusan strategis tentang pengembangan pariwisata, seperti perizinan bisnis, regulasi, atau penggunaan lahan, harus mempertimbangkan masukan dari masyarakat setempat.

## 2. Pendidikan dan Kesadaran:

Penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat setempat tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan. Program pendidikan dan penyuluhan harus dirancang untuk menjelaskan dampak pariwisata terhadap lingkungan, termasuk masalah seperti polusi air, degradasi tanah, dan kerusakan ekosistem. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat setempat akan lebih terbuka untuk mendukung praktik pariwisata yang berkelanjutan.

## 3. Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan:

Pemberdayaan masyarakat setempat melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan adalah langkah penting untuk membantu mereka berperan aktif dalam industri pariwisata. Ini termasuk pelatihan dalam manajemen bisnis, pelayanan pelanggan, kerajinan tangan,

panduan wisata lokal, dan keterampilan lain yang relevan. Dengan memiliki keterampilan yang diperlukan, masyarakat setempat dapat terlibat dalam berbagai sektor industri pariwisata dengan cara yang bermanfaat.

#### 4. Pemberdayaan Ekonomi Lokal:

Pemberdayaan ekonomi lokal adalah salah satu aspek utama dalam melibatkan masyarakat setempat. Ini dapat mencakup memberikan dukungan kepada warga setempat untuk mendirikan bisnis yang berkaitan dengan pariwisata, seperti restoran, penginapan, atau toko suvenir. Produk-produk dan layanan yang dihasilkan secara lokal dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

#### 5. Pelestarian Budaya dan Warisan:

Pelestarian budaya lokal adalah bagian penting dari pengembangan pariwisata berkelanjutan. Masyarakat setempat dapat memainkan peran kunci dalam mempromosikan dan melestarikan tradisi, kerajinan tangan, musik, tarian, dan kekayaan budaya lainnya. Ini tidak hanya memperkaya pengalaman wisatawan, tetapi juga membantu menjaga identitas budaya daerah.

#### 6. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan:



Masyarakat setempat harus terlibat dalam program pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Ini mencakup pengelolaan limbah, konservasi sumber daya alam, dan pelestarian ekosistem. Masyarakat juga dapat menjadi bagian dari proyek-proyek restorasi lingkungan, seperti penanaman pohon atau program pembersihan lingkungan. Dengan berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan, masyarakat setempat akan merasa memiliki tanggung jawab pribadi terhadap keberlanjutan destinasi mereka.

#### 7. Penghargaan atas Kontribusi Masyarakat Setempat:

Menghargai dan memberikan penghargaan atas kontribusi masyarakat setempat adalah langkah penting untuk memotivasi partisipasi mereka dalam upaya berkelanjutan. Ini bisa berupa penghargaan, pengakuan publik, atau kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan lebih lanjut. Penghargaan ini akan mengakui peran krusial masyarakat setempat dalam menjaga keberlanjutan destinasi pariwisata.

#### 8. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan:

Terakhir, penting untuk memasukkan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan dalam upaya melibatkan masyarakat setempat. Ini akan membantu mengukur dampak positif dari partisipasi mereka dalam pengembangan pariwisata, dan mengidentifikasi area-area di mana perbaikan lebih lanjut diperlukan.

Dalam upaya untuk mencapai pengembangan pariwisata yang berkelanjutan sambil menjaga kelestarian lingkungan di sekitar goa tersebut, melibatkan masyarakat setempat adalah prasyarat yang penting. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat setempat untuk merasakan manfaat ekonomi, melestarikan budaya, dan berpartisipasi aktif dalam menjaga keberlanjutan alam. Dengan langkah-langkah seperti partisipasi dalam pengambilan keputusan, pendidikan, pelatihan, pemberdayaan ekonomi, pelestarian budaya, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, penghargaan, dan pemantauan yang berkelanjutan, kita dapat menciptakan keseimbangan yang harmonis antara manusia dan alam, menjadikan pariwisata sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat dan merawat warisan lingkungan yang kita cintai untuk masa depan.



# **BAB VI**

## **KESIMPULAN & SARAN**

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Indonesia memiliki potensi pariwisata yang luar biasa, termasuk di Kabupaten Kotabaru, khususnya di Kecamatan Kelumpang Barat dengan dua goa menariknya, yaitu Goa Hasan Basry dan Goa Liang Udut. Namun, untuk mengembangkan potensi pariwisata ini, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif.

Pertama, perbaikan infrastruktur pendukung adalah kunci. Ini termasuk perbaikan akses jalan, fasilitas sanitasi yang memadai, fasilitas parkir, serta pendirian Pusat Informasi Wisata. Fasilitas ini akan meningkatkan kenyamanan pengunjung dan mengoptimalkan pengalaman mereka.

Kedua, strategi promosi pariwisata yang efektif diperlukan. Ini melibatkan penggunaan pemasaran digital, kerja sama dengan agen perjalanan, konten visual yang menarik, serta kolaborasi dengan influencer lokal. Dalam strategi ini, partisipasi komunitas setempat dan pendapat mereka harus diperhitungkan.

Ketiga, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan sangat penting. Analisis data kunjungan, umpan balik wisatawan, dan evaluasi kinerja kampanye promosi akan membantu menyesuaikan strategi di masa depan agar lebih efektif.

Keempat, keterlibatan masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan harus diintegrasikan. Keterlibatan masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan dan pelatihan mereka untuk mengelola pariwisata adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Selain itu, perlindungan lingkungan dan warisan budaya harus menjadi prioritas dalam pengembangan pariwisata.

Dengan pendekatan holistik ini, pengembangan pariwisata di Kecamatan Kelumpang Barat dapat menjadi sukses yang tidak hanya meningkatkan ekonomi lokal tetapi juga menjaga kekayaan alam dan budaya untuk generasi mendatang.

## **B. Saran**

1. Perbaiki Infrastruktur Pendukung:
  - a. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan perbaikan akses jalan menuju kedua goa, termasuk pemeliharaan rutin dan evaluasi untuk memastikan akses yang memadai sepanjang tahun.
  - b. Fasilitas sanitasi, seperti toilet umum yang bersih dan tempat sampah yang memadai, harus ditingkatkan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung.
  - c. Pembenahan fasilitas parkir juga harus menjadi fokus, sehingga wisatawan memiliki tempat yang aman untuk memarkir kendaraan mereka.
2. Pusat Informasi Wisata:

Didirikan pusat informasi wisata yang informatif dan interaktif yang menyediakan informasi tentang atraksi lokal, rute wisata, serta fasilitas di sekitar goa. Hal ini akan membantu pengunjung merencanakan kunjungan mereka dengan lebih baik.

3. Promosi Pariwisata yang Efektif:

- a. Pengembangan situs web resmi yang informatif dan interaktif, serta penggunaan media sosial untuk membagikan konten berkualitas tinggi yang menarik minat wisatawan potensial.
- b. Kolaborasi dengan agen perjalanan lokal dan internasional untuk memperkenalkan destinasi ini kepada target pasar yang lebih besar.
- c. Menggunakan konten visual yang memukau, seperti video dan foto profesional, untuk mempromosikan keindahan alam dan budaya di sekitar goa.
- d. Kolaborasi dengan *influencer* atau pembuat konten lokal atau regional untuk meningkatkan visibilitas destinasi ini.

4. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan:

- a. Pemantauan terus-menerus terhadap kunjungan, umpan balik wisatawan, dan kinerja promosi pariwisata akan memberikan wawasan untuk meningkatkan strategi di masa depan.
- b. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan tren pariwisata dan kebutuhan pasar adalah kunci keberhasilan jangka panjang.

5. Keterlibatan Masyarakat Lokal dan Keberlanjutan Lingkungan:

- a. Melibatkan masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata untuk memastikan pelestarian budaya dan alam.
- b. Mengadakan program pelibatan masyarakat setempat, seperti pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas, agar mereka menjadi mitra yang efektif dalam mengelola destinasi pariwisata.
- c. Menerapkan praktik pariwisata yang ramah lingkungan dan mengurangi dampak lingkungan dengan pengelolaan limbah yang baik dan perencanaan berkelanjutan.
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan, pemantauan kualitas air dan udara, serta perlindungan warisan budaya.

## Daftar Pustaka

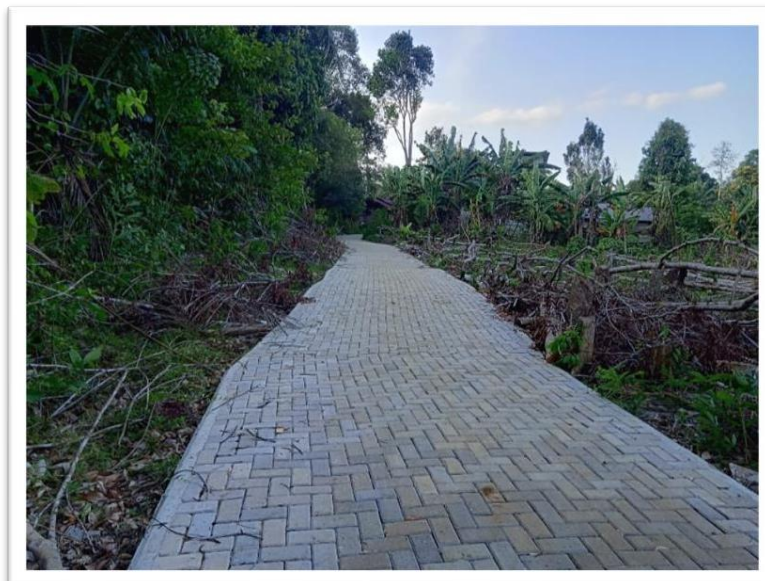
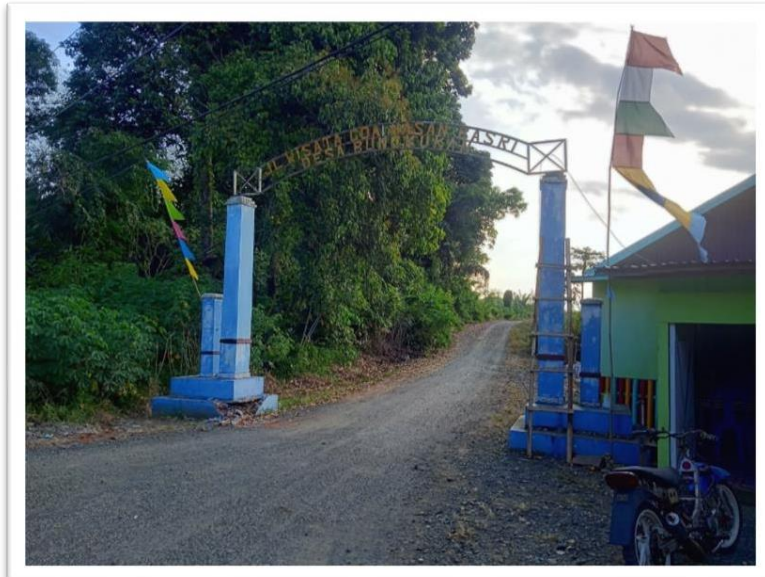
- Ali, Mohammad. *Pendidikan untuk pembangunan nasional: menuju bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya saing tinggi*. Jakarta: Grasindo, 2009.
- Bintarto, R. *Desa-Kota*. Bandung: Alumni, 1986.
- Hidjaz, Kamal. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar: Pustaka Refleksi, 2010.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Islamy, M Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, t.t.
- Kabupaten Kotabaru Dalam Angka 2023*. 2023: BPS Kabupaten Kotabaru, Kotabaru.
- Kartasasmita, Ginandjar. *Pembangunan untuk rakyat : memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. Jakarta: Cides, 1996.
- Karyono, A. Hari. *Kepariwisata*. Jakarta: Grasindo, 1997.
- Kodyat, H. *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1982.
- Manan, Bagir. "Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah." Dipresentasikan pada Makalah Pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, Mei 2000.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Saparin, Sumber. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Siagian, Sondang P. *Analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi*. Jakarta: Haji Masagung, 1994.
- Soemardjan, Selo. *Pariwisata dan Kebudayaan*. Jakarta: Prisma, 1977.
- Soemardjono, Maria SW. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1989.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Yoety, Oka A. *Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Yudoyono, Bambang. *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.

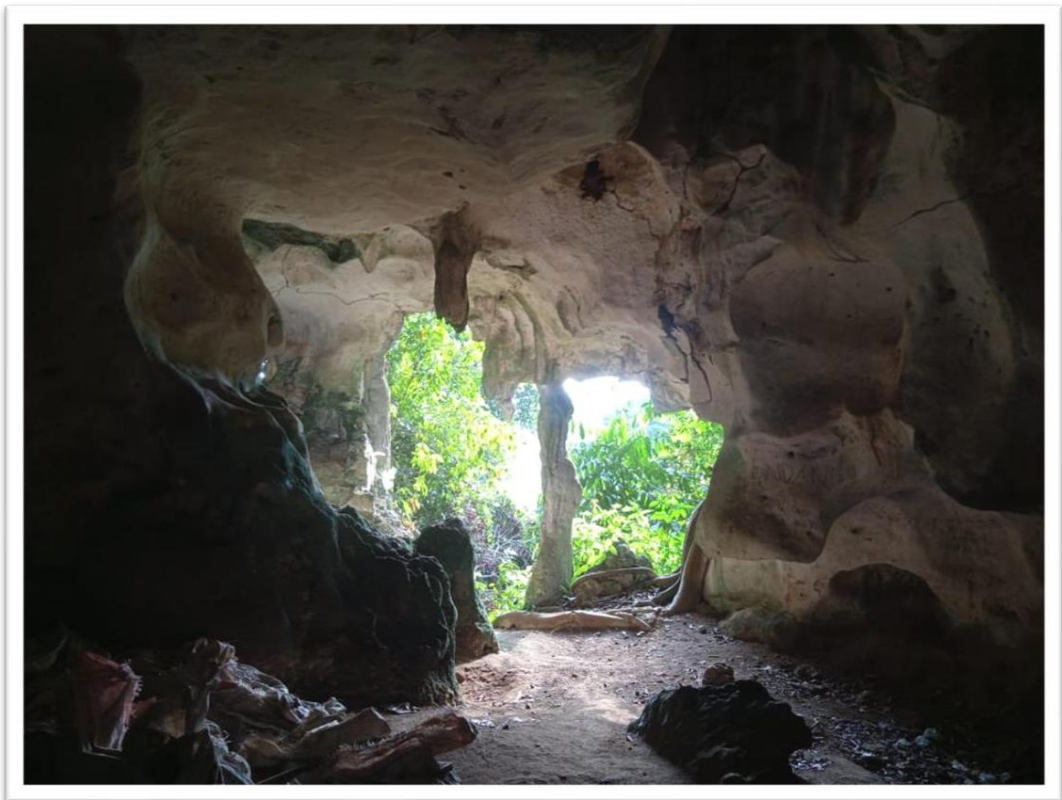
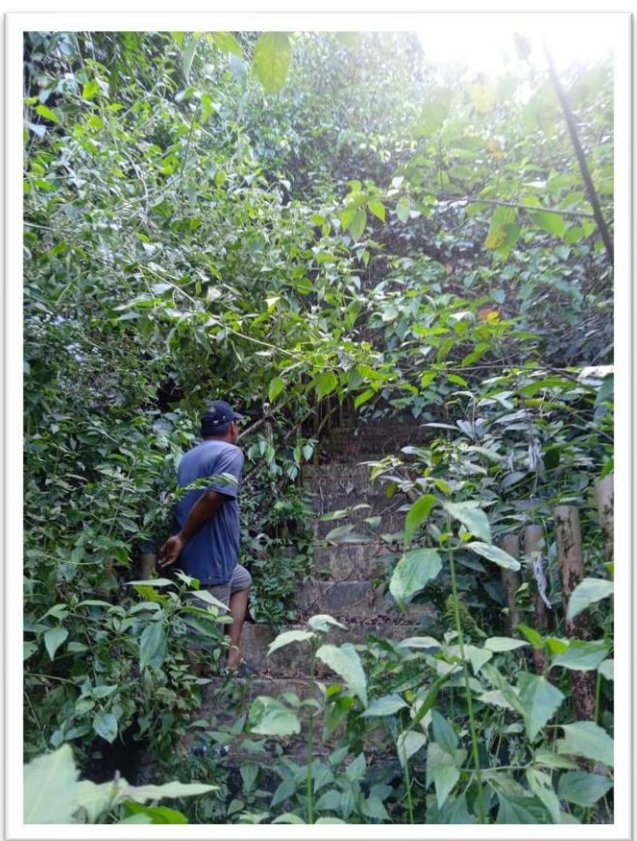


## LAMPIRAN LOKASI PENELITIAN

### GOA HASAN BASRY:

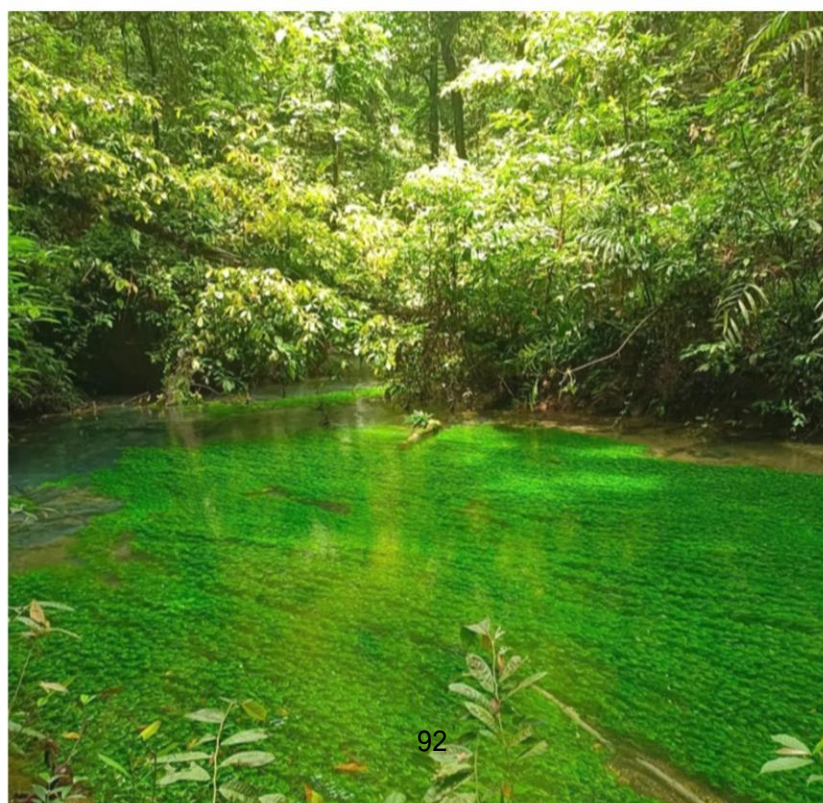
Goa Hasan Basri, terletak di Desa Bungkukan Kecamatan Kelumpang Barat. Lokasi goa tidak begitu jauh dari jalan utama (Jl. A.Yani), menuju lokasi dapat dilakukan dengan masuk ke jalan Desa yg dapat dilalui Mobil. Jalan kaki hanya dilakukan ketika menaiki anak tangga Goa Hasan Basri. jumlah anak tangga kurang lebih 50an dengan kemiringan hampir 90 derajat. Anak tangga tersebut dibangun Desa beberapa tahun yg lalu. Kondisi Goa sekarang tidak terurus lagi, anak tangga ditumbuhi semak belukar dan goa banyak coretan. Perlu kiranya perhatian dari Pemerintah Daerah untuk pelestarian lokasi bersejarah tersebut.

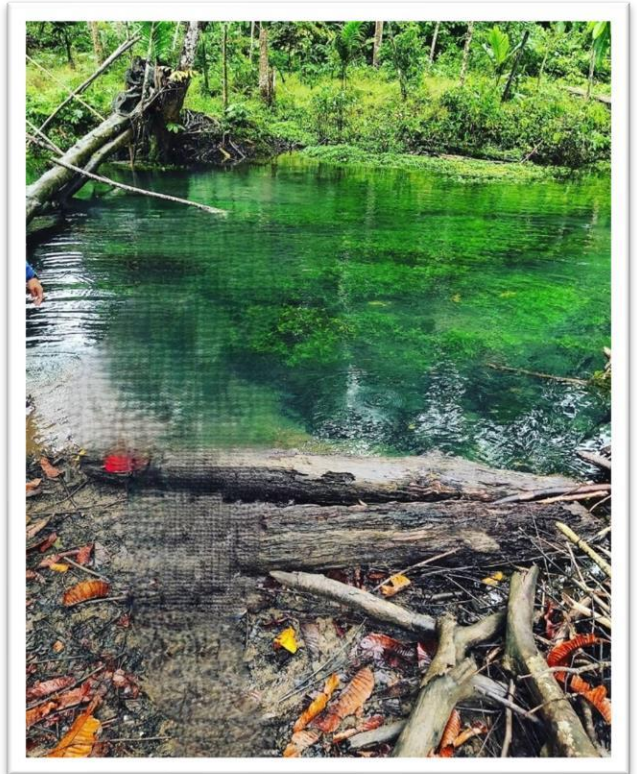
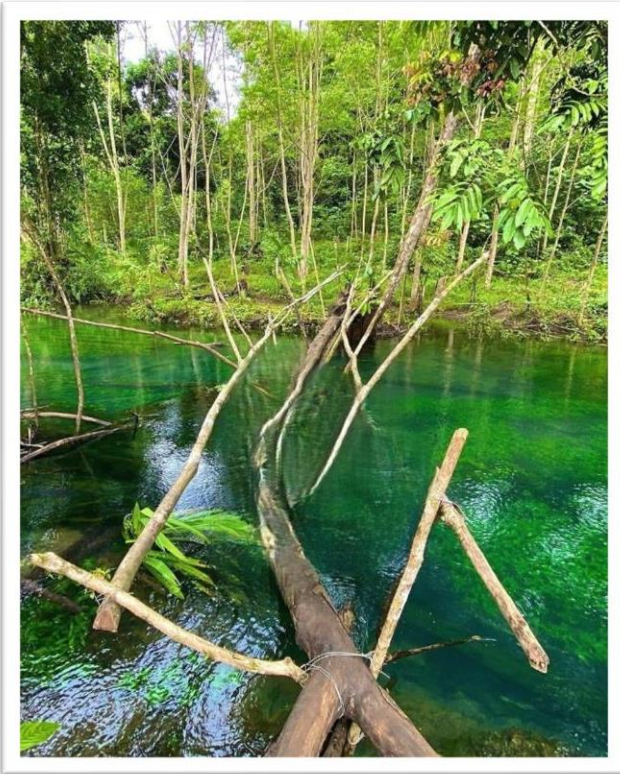


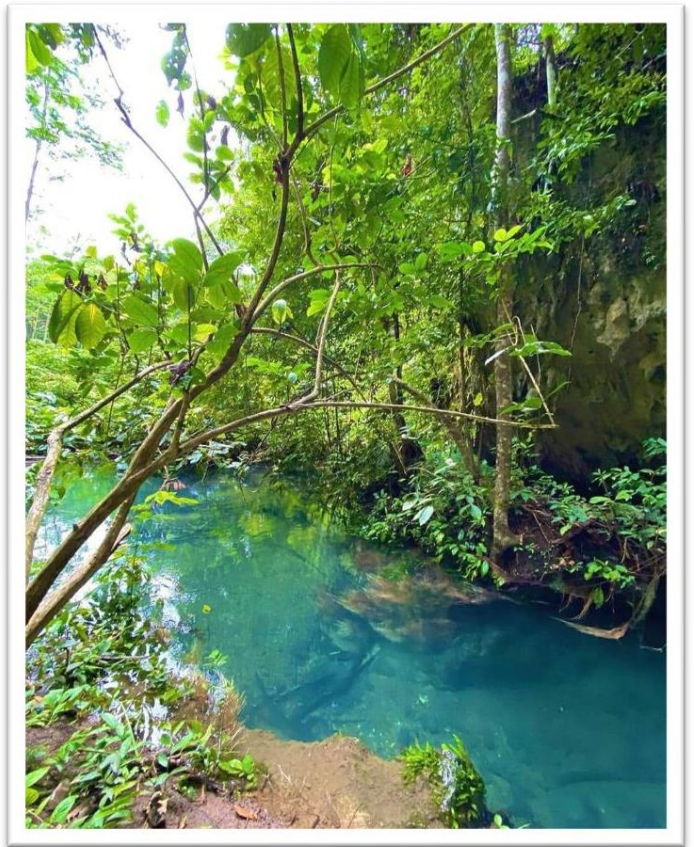
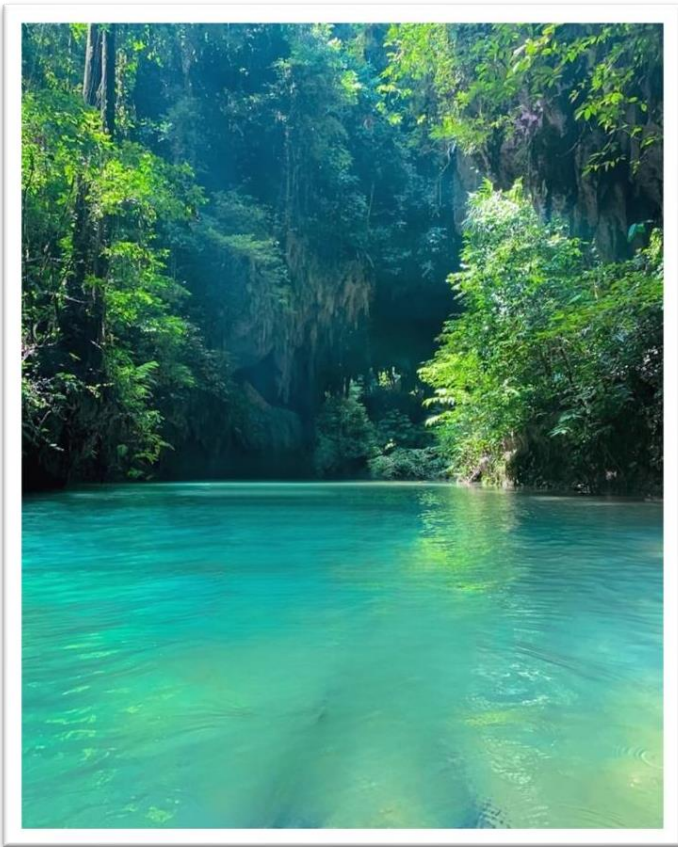
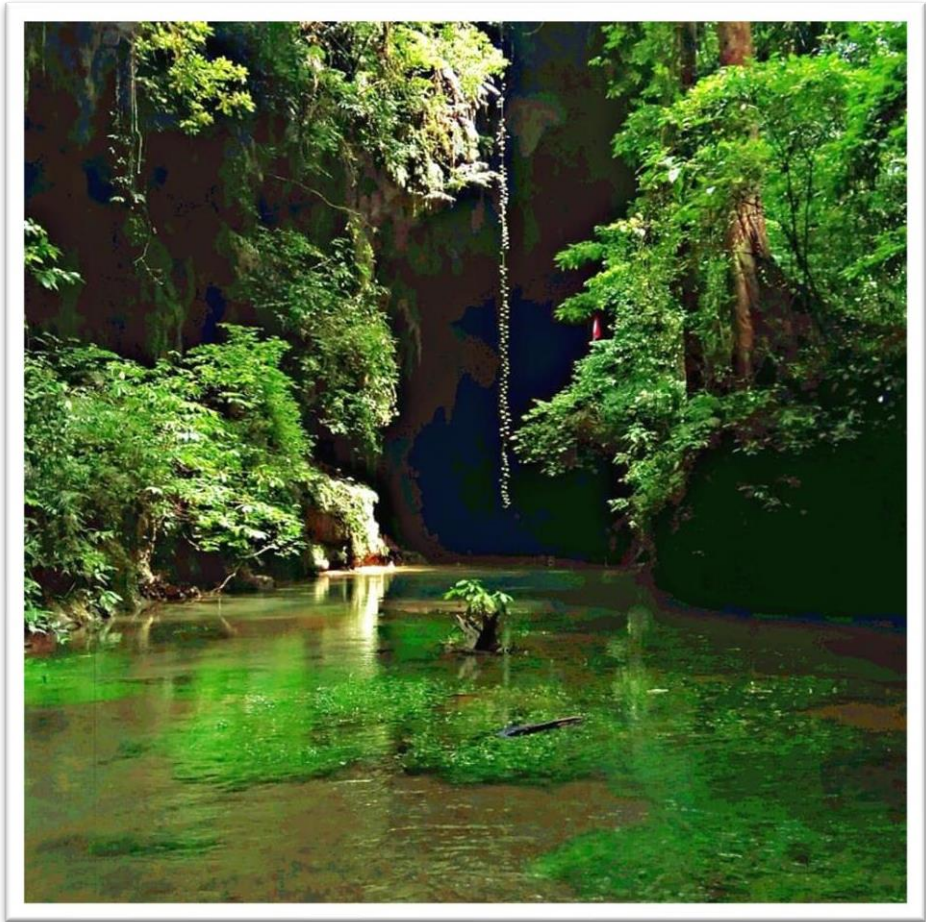


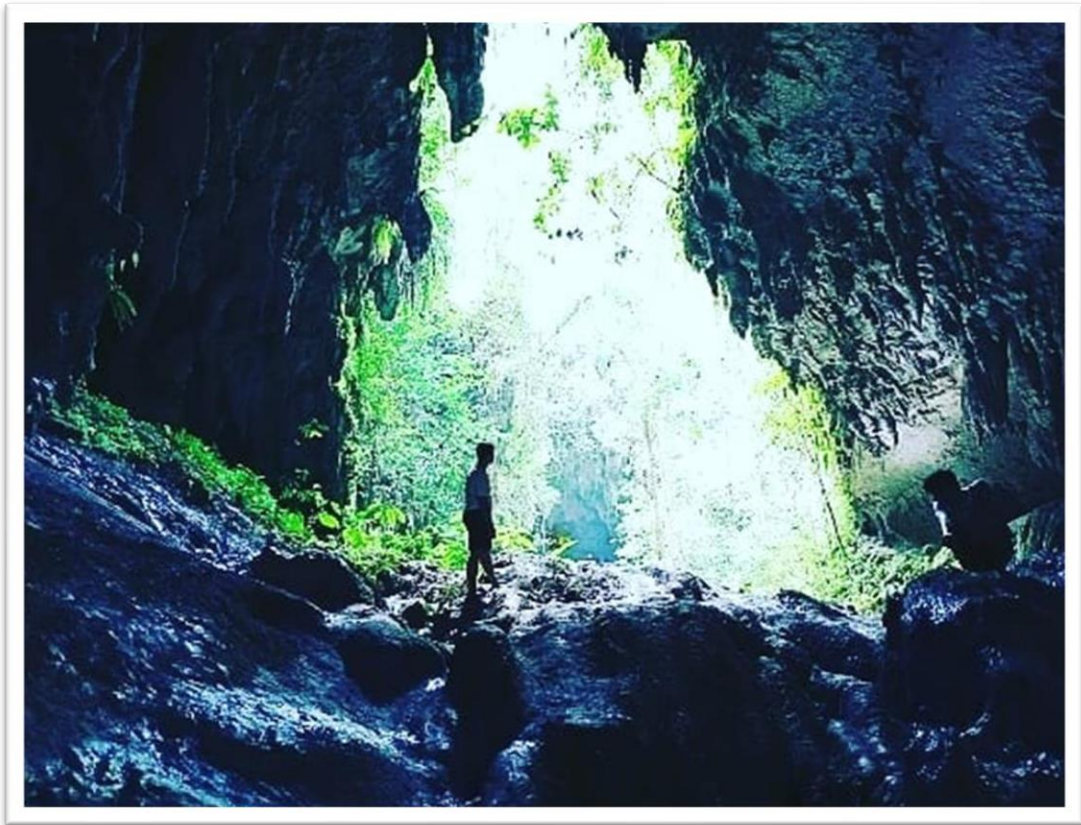
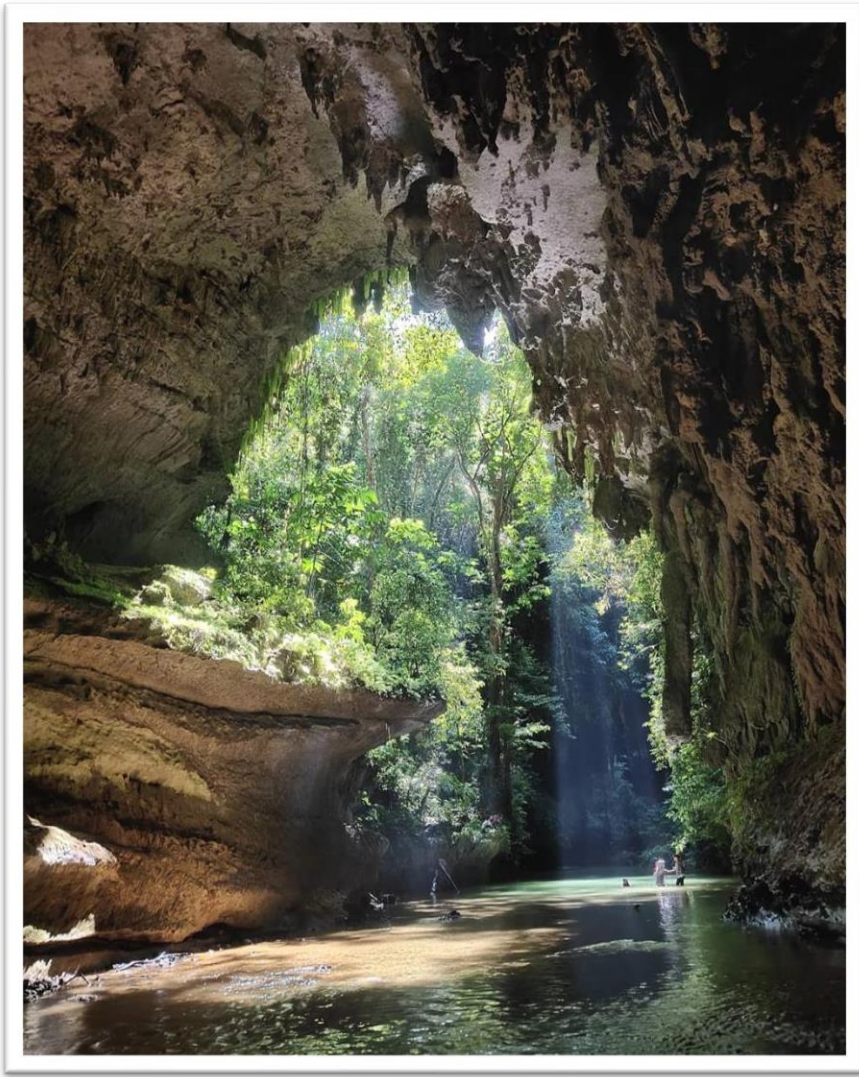
## **GOA LIANG UDUT**

Goa Liang udud, terletak di Desa Batang Kulur Kecamatan, Kelumpang Barat. lokasi berada sebelah jalan A. Yani apabila menuju arah Kal-Tim. Akses masuk ke lokasi ditempuh dengan berjalan kaki dari Jl. A. Yani dalam waktu tempuh kurang lebih 30 menit sampai dengan 1 jam dengan melewati medan kebun sawit, tanjakan, batu terjal dan goa batu, Lokasi Goa Liang Udud berada pada hutan yg Masih perawan dengan pepohonan sangat lebat serta udara yg sejuk. banyak pemandangan yg indah untuk ketika dalam perjalanan kaki menuju Goa tersebut.









## Kegiatan Diskusi Bersama Stakeholders

